

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

KOTA RANTEPAO

SKRIPSI

Oleh :

FITRIANI M

NIM 45 13 042 031



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2018

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

KOTA RANTEPAO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh :

FITRIANI M

NIM 45 13 042 031

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2018

UJIAN AKHIR

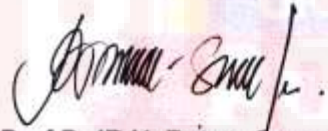
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KOTA RANTEPAO

Disusun dan diajukan oleh

FITRIANI M
45 13 042 031

Menyetujui :

Pembimbing I


Prof. Dr. IR. H. Batara Surya, M.Si
NIDN: 0913017103

Pembimbing II

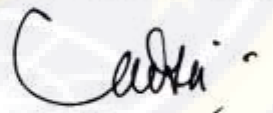

S. Kamran Aksa, ST., MT
NIDN: 0911077102

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar


Dr. Hamsina, ST, M.Si.
NIDN: 0924067601

Ketua Jurusan
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota


Ir. Jufriadi, M.SP.
NIDN: 0931016802

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor : A.026/SK/FT/UNIBOS/II/2018 Pada Tanggal 20 Maret 2018 Tentang PANITIA DAN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, maka :

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018

Skripsi Atas Nama : FITRIANI M

Nomor Pokok : 45 13 042 031

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Ir. Rudi Latief, M.Si

Sekretaris : Rusneni, ST., M.Si

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si
2. S. Kamran Aksa, ST., MT

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


Dr. HAMSINA, ST., M.Si
NIDN : 0924067601

KETUA JURUSAN
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


Ir. JUFRIADI, M.SP.
NIDN: 0931016802

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan diawah ini :

Nama : Fitriani M

Stambuk : 45 13 042 031

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang ditulis ini bahwa benar merupakan tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa adanya kesamaan penulisan dengan skripsi-skripsi sebelumnya, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan dari pihak jurusan atau kampus atas perbuatan tersebut.

Makassar, January 2018

Yang menyatakan,

Fitriani M

ABSTRAK

FITRIANI M (45 13 042 031). Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kota Rantepao. dibimbing oleh **Batara Surya, S.Kamran Aksa.**

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. peran serta masyarakat dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah yang secara langsung dapat memperbaiki kapasitas mereka dalam mencapai kesepakatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa rencana tata ruang pada dasarnya merupakan kesepakatan berbagai stakeholders yang dilahirkan melalui serangkaian dialog yang konstruktif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat dalam penataan ruang Kota Rantepao dan untuk menganalisis pengaruh yang signifikan terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang Kota Rantepao.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan target penelitian adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status masyarakat, kedudukan masyarakat dan kelembagaan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, survey instansi, wawancara, Koesioner dan dokumentasi kemudian diproses menggunakan metode analisis Deskriptif Kuantitatif dan analisis Regresi Linear.

Dari proses analisis deskriptif Kuantitatif akan diperoleh sejauh mana peran masyarakat dalam penataan ruang Kota Rantepao.

Hasil analisis diketahui bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status masyarakat, kedudukan masyarakat dan Kelembagaan terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang Kota Rantepao, maka Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan digunakan adalah Analisis Regresi Linear. Dan dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh yang signifikan terhadap peran masyarakat terhadap penataan ruang kota Rantepao yaitu tingkat pendidikan dan kedudukan masyarakat.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, dalam penataan ruang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa kita curahkan atas segala limpahan Dan Rahmat Karunia -Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KOTA RANTEPAO.”** Tugas Akhir ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana STRATA SATU (S-1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar dan merupakan salah satu proses akhir dari kegiatan pembelajaran di Universitas pada umumnya dan Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Pada khususnya.

Penulis menyadari telah sepenuhnya mengerahkan segala kemampuan dan usaha, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan lupa serta keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, masih banyak terdapat kekurangan dari tugas akhir ini.

Oleh karenanya, dengan rasa tulus dan ikhlas, selayaknyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pemberi atas segala rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
2. Bapak Prof.Dr.Ir.H.Batara Surya,M,Si Selaku Pembimbing I dan S.Kamran Aksa,ST.,MT selaku Pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan

bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan Skripsi ini hingga selesai.

3. Ibu DR. Hamsina ST, M.Si selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Jufriadi, ST.,MSP selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
5. Pihak Dinas PU,PEMDA,Badan Pusat Statistik, dan juga Masyarakat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
6. Ayahanda dan Ibunda Tercinta Bapak Mustari dan Ibu Nusi Sebagai orang tua yang sangat saya Banggakan dan Cintai.
7. Teman-teman seperjuanganku Teknik Planologi angkatan 2013 . Mudah - mudahan kebersamaan yang terjalin tidak akan putus Sampai kapanpun. Semoga kita mencapai cita-cita kita.
8. Teman-teman KKN Ang.42 Bantaeng yang juga turut membantu penulis dan memberikan semangat.
9. Bapak dan Ibu Staf pengajar serta karyawan (i) jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Makassar, atas segala bimbingan, didikan dan bantuan selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan sejak awal hingga selesai.

Akhir kata ,semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala dan imbalan setimpal dari Allah SWT. Dan mudahmudahan karya tulis ini daoat bermanfaat bagi kita

semua terutama bagi penulis dimasa yang akan datang. Wasalamu
Alaikum Warahmatullahi

Makassar,

2017

FITRIANI M

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR PETA	xvii
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	10
A. Pengertian Peran Masyarakat	10
1. Bentuk dan Tahapan Partisipasi	14
2. Cara Menggerakkan Partisipasi	15
B. Urgensi Peran Masyarakat	18
C. Kebijakan Pemerintah dalam Peran Masyarakat.	20
a. Kebijakan Lepas Tangan	20
b. Kebijakan Pembatasan	21
c. Kebijakan Mendukung	22
D. Penguatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	23
E. Faktor – faktor yang Berhubungan dengan Peran Masyarakat.	24
a. Tingkat Pendidikan	25
b. Tingkat Pendapatan	26
c. Status Masyarakat	27
d. Kedudukan Masyarakat	27

e. Kelembagaan.....	28
F. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah dan Kota	29
G. Kerangka Fikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Observasi	37
2. Survei	37
3. Dokumentasi	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
1. Jenis Data.....	38
2. Sumber Data.....	39
E. Variabel Penelitian	40
1. Variabel Pengaruh (X)	40
2. Variabel Terpengaruh (Y)	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif.....	41
2. Analisis Regresi Linier	42
G. Definisi Operasional	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Toraja Utara	46
1. Aspek Fisik Dasar	46
a. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah	46
b. Kondisi Topografi.....	50
c. Kondisi Jenis Tanah.....	53
d. Kondisi Hidrologi.....	56
2. Potensi Sumber Daya Alam.....	58

a. Kondisi Pertanian	58
b. Kondisi Perkebunan	59
c. Kondisi Perikanan.....	59
3. Potensi Sumber Daya manusia	60
a. Laju dan Jumlah Penduduk	60
b. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	63
c. Sebaran dan Kepadatan Penduduk	65
d. Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	67
B. Gambaran Umum Kota Rantepao	68
1. Aspek Fisik Dasar	68
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah	68
b. Topografi.....	69
c. Kondisi Jenis Tanah.....	70
d. Kondisi Hidrologi.....	71
e. Iklim dan Curah Hujan	72
2. Potensi Sumber Daya Alam	73
a. Produksi Pertanian	73
3. Potensi Sumber Daya Manusia.....	75
a. Kondisi Jumlah Penduduk	75
b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	76
4. Potensi Sumber Daya Buatan	78
a. Fasilitas Pemerintah	78
b. Fasilitas Perdagangan	78
c. Fasilitas Peribadatan	79
d. Fasilitas Kesehatan	79
e. Fasilitas Pendidikan	81
f. Fasilitas Olahraga.....	82
g. Jaringan Jalan	82
h. Jaringan Drainase	82
i. Jaringan Air Bersih	83

j. Jaringan Telpon	83
k. Jaringan Listrik.....	84
C. Pembahasan	85
1. Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruag Kota Rantepao...	85
a. Analisis Deskriptif Kuantitatif	85
• Tingkat Pendidikan	85
• Tingkat pendapatan	86
• Status masyarakat	88
• Kedudukan masyarakat	89
• Kelembagaan	91
2. Pengaruh Signifikan peran masyarakat dalam penataan ruang Kota Rantepao	92
▪ Analisis Regresi Linear	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017.....	49
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2017	61
Tabel 4.3	Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Toraja Utara tahun 2017	64
Tabel 4.4	Sebaran dan Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan di Kabuapten Toraja Utara Tahun 2017.....	66
Tabel 4.5	Penduduk Berdasarkan Agama pada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017	68
Tabel 4.6	Topografi dan Kemiringan Lereng di Kota Rantepao	70
Tabel 4.7	Jumlah curah hujan di Kota Rantepao tahun 2017	73
Tabel 4.8	Luas lahan panen dan produksi menurut jenis tanaman di Kota Rantepao tahun 2017	74
Tabel 4.9	Kepadatan penduduk di Kota Rantepao Tahun 2017.....	75
Tabel 4.10	Penduduk menurut jenis kelamin dan kepala keluarga (KK) dirinci per kelurahan Tahun 2017	76
Tabel 4.11	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Kelurahan di Kota Rantepao Tahun 2017	80
Tabel 4.12	Jumlah Fasilitas Pendidikan Dirinci Per Kelurahan di Kota Rantepao Tahun 2017.....	81
Tabel 4.13	Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Tahun 2017.....	85
Tabel 4.14	Distribusi Tingkat Pendapatan Responden Tahun 2017	87
Tabel 4.15	Distribusi Responden Menurut Status Masyarakat Tahun 2017	88
Tabel 4.16	Distribusi Responden Menurut Kedudukan Masyarakat Tahun 2017	89
Tabel 4.17	Distribusi Respoden Menurut Kelembagaan Tahun 2017.....	91
Tabel 4.18	Rekapitulasi Perhitungan Analisis Regresi Linear.....	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Utara.....	70
Grafik 4.2	Guna lahan Kabupaten Kolaka Utara.....	79
Grafik 4.3	Luas Wilayah Kota/Kecamatan Lasusua.....	86
Grafik 4.4	Guna Lahan Kota/Kecamatan Lasusua.....	93
Grafik 4.5	Jumlah Penduduk Kota/Kecamatan Lasusua.....	95
Grafik 4.6	Perebaran Jumlah penduduk Kota/Kecamatan Lasusua.....	98
Grafik 4.7	Kepadatan Penduduk Kota/Kecamatan Lasusua.....	100
Grafik 4.8	Luas Tanaman Perkebunan Kota lasusua.....	109
Grafik 4.9	Populasi Ternak di Kota lasusua.....	110
Grafik 4.10	Jumlah Penduduk 4 Tahun Terakhir.....	126
Grafik 4.11	Estimasi Jumlah Penduduk 20 Tahun Kedepan.....	128

DAFTAR PETA

1	Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara.....	48
2	Peta Topografi Kabupaten Toraja Utara.....	52
3	Peta Jenis Tanah Kabupaten Toraja Utara.....	55
4	Peta Hidrologi Kabupaten Toraja Utara.....	57
5	Peta Administrasi Kota Rantepao.....	
6	Peta Topografi Kota Rantepao.....	
7	Peta Jenis Tanah Kota Rantepao.....	

BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota di Indonesia pada umumnya merupakan hasil perkembangan dari suatu desa. Di dalamnya terdiri dari lingkungan yang beranekaragam. Keanekaragaman kegiatan atau aktifitas dalam kota menentukan besar kecilnya suatu kota, disamping luas areal dan jumlah penduduk. Perkembangan kota-kota di Indonesia ini membentuk lingkungan perkotaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Kompleksitas tersebut tidak terlepas dari timbulnya permasalahan yang kompleks pula. Konsentrasi penduduk dengan pemusatan segala aktifitas, terjadinya interaksi antar penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang menjadikan karakteristik lingkungan perkotaan menjadi berbeda dengan kondisi di pedesaan.

Implikasi dari morfologi kota tersebut adalah perubahan struktur kota yang menjadi ciri dari perkotaan yang berbeda antara satu kota dengan kota yang lainnya. Meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan ruang terbuka, tempat kerja yang diikuti dengan kebutuhan pelayanan serta kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan kota itu sendiri. Tingginya kebutuhan tersebut menuntut pemerintah kota untuk dapat

memperluas lingkup pelayanan guna mengimbangi besarnya permintaan masyarakat.

Paradigma baru penataan ruang di perkotaan saat ini, adalah pelibatan peran serta masyarakat dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang kota. Penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pengembangan wilayah yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang bertempat tinggal di ruang yang nyaman dan lestari. Melalui penataan ruang pada akhirnya hak seseorang (*property right*) dapat terlindungi tanpa menghambat inovasi dan kreatifitasnya dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang sistematis dan terintegrasi.

Penguatan peran serta masyarakat yang telah ada tersebut, seharusnya dapat menjadi landasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi akibat produk suatu rencana tata ruang di daerah perkotaan.

Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah maupun rencana yang sifatnya rinci, maka prosesnya harus senantiasa melibatkan masyarakat, seperti telah diatur dalam PP No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Namun peraturan tersebut hingga

kini belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan karena masyarakat merasa tidak memahami arti penting dan manfaat penataan ruang.

Mengacu pada UU No.32/2004 Bab VII Pasal 150 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus mengikutsertakan masyarakat dan swasta. Karena itu, setiap jenis rencana pembangunan kota dan wilayah tidak cukup hanya dengan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi lebih jauh harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat. Pengembangan wilayah dan kota (Kawasan Perkotaan) seyogyanya mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi rencana pembangunan yang berasal dari masyarakat (*community-driven planning*) melalui mekanisme forum kota atau “rembug” desa sebagai media untuk menggali aspirasi dari bawah. Lebih lanjut dalam upaya penciptaan penertiban pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan nasional dan untuk melaksanakan pembangunan kota terpadu, pemanfaatan ruang kota yang optimal, berkelanjutan, seimbang dan serasi, maka oleh pemerintah telah dikeluarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kepmenkimpraswil) No.327 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan, yang ditegaskan bahwa maksud Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah untuk mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam

pengembangan perkotaan, hak dan kewajiban masyarakat kota harus tercermin dalam proses perencanaan.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui pembentukan forum kota, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat). Di samping hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penataan ruang, masyarakat juga wajib menjaga kualitas ruang dengan mematuhi dan mentaati segala ketentuan normatif yang telah ditentukan dalam peraturan terkait. Peran serta masyarakat dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah yang secara langsung dapat memperbaiki kapasitas mereka dalam mencapai kesepakatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa rencana tata ruang pada dasarnya merupakan kesepakatan berbagai stakeholders yang dilahirkan melalui serangkaian dialog yang konstruktif dan berkelanjutan.

Saat ini permasalahan penataan ruang yang sering terjadi adalah berupa ketidakpedulian masyarakat (publik) dalam penyelenggaraan penataan ruang dan adanya sikap acuh dan kurang memahami esensi penataan ruang itu sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya pelibatan

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang (sumber : pernyataan Direktur TARUNAS, Bpk.Iman Soedradjat)

Penyimpangan yang terjadi dalam penataan ruang kota juga terjadi di Kota Rantepao. Kasus lemahnya pemahaman masyarakat Kota Rantepao juga menjadi salah faktor terjadinya konflik dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Kota Rantepao harus menyadari pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap materi yang ditetapkan dalam produk Rencana Tata Ruang terutama mengenai pemanfaatan ruang kota. Penataan Ruang Kota Rantepao saat ini secara keseluruhan belum dapat mengaplikasikan materi yang termuat dalam UU No.24 Tahun 1992, kondisi tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya keterlibatan masyarakat kota sehingga produk rencana tata ruang yang dihasilkan masih menimbulkan kondisi yang kontradiksi dengan situasi sebenarnya yang terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat pada pemanfaatan ruang yang masih mengutamakan kepentingan pembangunan fisik kota semata, dimana fungsi dan kegunaannya kurang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan kondisi dan kenyataan yang terjadi di Kota Rantepao tersebut, maka peneliti merasa terpanggil untuk mencoba merubah serta memberi penguatan atas peran masyarakat Kota Rantepao dalam keterlibatannya pada proses penataan ruang kota. Peneliti menganggap penting untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam hal penataan ruang, serta menyelesaikan

permasalahan penataan ruang Kota Rantepao dalam rangka menciptakan arah pembangunan yang lebih harmonis dan mencoba memperbaiki tatanan pemanfaatan ruang di Kota Rantepao sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat kota tentang pentingnya penataan ruang..

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang pengambilan judul di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab adalah :

1. Bagaimana peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao?
2. Adakah pengaruh signifikan peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota Rantepao ini bertujuan ;

1. Untuk mengkaji peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao.
2. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

1. hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu PWK yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada jurusan PWK. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang peran masyarakat dalam penataan ruang .
2. sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan, sehingga memperoleh solusi dalam memecahkan masalah penataan ruang dan sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kota.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Rantepao dengan ruang lingkup penelitian mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang . Dengan lingkup variabel yang akan diteliti yaitu keterlibatan masyarakat

dalam penataan ruang seperti pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dan pengaruh signifikan peran masyarakat dalam penataan ruang. Jadi batasan kajian yang dilakukan akan melihat bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota Rantepao.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal ini di bagi ke dalam tiga Bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, ruang lingkup penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang Batasan Pengertian Judul, Tinjauan Pustaka, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kota Rantepao dan kerangka fikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Jenis Penelitian, Lokasi, , Teknik Pengumpulan Data, jenis dan sumber data, variabel penelitian Teknik Analisa Data, Definisi Operasional,.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang Gambaran Umum Kota Rantepao, Tinjauan Lokasi Studi, peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao dan pengaruh signifikan peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Masyarakat

Secara umum peran serta didefinisikan dengan ikut serta atau mengambil bagian. *“The taking part in one or more phases of the process”* atau peran serta berarti mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dan proses yang dimaksud disini tentunya adalah pembangunan. Berbeda dengan pendapat tersebut, Davis dalam Maria (2000 : 10) mengemukakan bahwa peran serta *“as mental and emotional involvement of person in a group situation wich encourages him to contribute group goal and share responsibility in them”*. Dalam pengertian ini dapat dijabarkan dalam tiga arti pokok yaitu;

- a. Peran serta merupakan keterlibatan mental dan emosional.
- b. Peran serta menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan.
- c. Peran serta merupakan tanggung jawab terhadap kelompok.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Davis dan Newstrom dalam Maria, (2000 : 10); bahwa peran serta sebagai keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggungjawab atas pencapaian tujuan tersebut.

Ada tiga gagasan penting yang terkandung dalam pengertian di atas antara lain;

1. Keterlibatan; peran serta berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dan bukan saja aktifitas fisik. Keterlibatan ini bersifat psikologis, sehingga seseorang yang berperan serta terlibat emosinya dan bukan terlibat karena tugas yang diemban.
2. Kontribusi; motivasi orang-orang yang berperan serta adalah dapat memberikan kontribusi. Mereka yang diberikan kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreatifitasnya guna mencapai tujuan organisasi.
3. Tanggungjawab; bahwa peran serta mendorong orang-orang untuk menerima tanggungjawab dalam aktifitas kelompok. Disini terjadi proses sosial, orang-orang yang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi pada akhirnya merasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaannya

Mubyarto dalam Ndraha (1987 : 102) mendefinisikan peran serta sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Selanjutnya ia mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Selanjutnya Bryant dan White dalam Ndraha (1987 : 102) menyebut dua macam partisipasi; partisipasi antar sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horisontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron, atau antara masyarakat dengan pemerintah,

yang disebut partisipasi vertikal. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan, kampanye, dan sebagainya, disebut partisipasi dalam proses politik, sedangkan keterlibatan dalam kegiatan seperti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administratif. Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok disebut partisipasi individual. (Davis dalam Ndraha, 1987 : 102).

Sekalipun masih sulit kesepakatan para ahli dalam pengukuran bentuk peran masyarakat dalam pembangunan, namun pengertian dari Mubiyarto tersebut menggambarkan interpretasi yang lebih luas yaitu "ikut serta" tanpa mengorbankan diri sendiri.

Ndraha (1987 : 100-103) membagi peran serta masyarakat atas peran serta vertikal dan peran serta horisontal. Disebut peran serta vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan mana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan yang mengikuti. Sedangkan yang dimaksud dengan peran serta horisontal karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa baik dalam melakukan usaha bersama anggota kelompok maupun melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Berdasarkan pengertian di atas dan dalam kaitan dengan tulisan ini maka peran serta vertikal merupakan bentuk peran serta yang sangat cocok, dimana masyarakat sebagai pihak bawahan mengambil bagian dengan berkewajiban mengikuti program atau aturan yang ditetapkan oleh pihak atasan (Pemerintah) dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan khususnya dalam proses penataan ruang kawasan perkotaan.

Wujud dari peran serta dapat dinyatakan dalam bentuk tenaga, uang (materi), atau pikiran. Bobot dari masing-masing wujud peran serta berbeda-beda dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya, dan juga berbeda dari suatu jenis atau sifat kegiatan (pembangunan) ke kegiatan yang lain. Seringkali wujud dari peran serta ini juga dapat menunjukkan kelas atau golongan sosial dari partisipan, kelas atau golongan sosial bawah pada umumnya mewujudkan peran serta mereka dalam bentuk tenaga, sedangkan wujud uang dan atau materi dan pikiran merupakan bentuk peran serta kelompok menengah ke atas.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka wujud peran serta yang diharapkan dari masyarakat dalam konteks ini adalah kesadaran masyarakat secara umum dari semua golongan/lapisan masyarakat. Kesadaran dalam memahami arti dari penataan ruang dengan konteks

pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang yang di tuangkan dalam Rencana Tata Ruang Kota.

Partisipasi dapat merupakan keluaran pembangunan dan dapat juga merupakan masukan terhadap proses tersebut, bahkan masukan yang mutlak diperlukan (Mubyarto dalam Ndraha, 1987 : 103). Disamping itu, partisipasi dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek pembangunan atau bukan. Jika masyarakat desa yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, proyek tersebut pada dasarnya bukanlah proyek pembangunan desa.

1. Bentuk dan Tahapan Partisipasi

- Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial (Roger dan Staudt dalam Ndraha, 1987 : 103).
- Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat, partisipasi ini disebut juga

partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka (Mubyarto dalam Ndraha, 1987 : 103), dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis (disain proyek, Mosha dan Matte dalam Ndraha, 1987 : 103).

- Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, biasa disebut dengan istilah "*participation benefits*".
- Partisipasi dalam menilai pembangunan (Mosha dan Matte, Cohen dan Uphoff dalam Ndraha, 1987 : 104), yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Cara Menggerakkan Partisipasi

Perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi. Agar perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, usaha itu adalah:

- Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need, Narain dalam Ndraha, 1987 : 104).
- Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*response*) yang dikehendaki (Mednick, Higgins,

dan Kirschenbaum, Cecco dan Crawford, definisi “*Community development*” dari PBB dalam Ndraha, 1987 : 104).

- Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*) yang dikehendaki secara berlanjut, misalnya partisipasi horisontal. (Cofer dan Appley, Bryant dan White dalam Ndraha, 1987 : 104).

Untuk menggerakkan masyarakat agar ikut berperan serta dalam pembangunan, Khairudin dalam Ndraha (1987 : 104) menyatakan bahwa perlu adanya beberapa faktor yang dapat memotivasi mereka untuk turut berperan serta dalam pembangunan. Motivasi yang bersifat umum adalah apabila hasil peran serta tersebut dapat dinikmati langsung dan memberi keuntungan bagi masyarakat itu sendiri.

Ditinjau dari segi motivasi, peran serta anggota masyarakat terjadi karena beberapa faktor antara lain;

- Takut/ terpaksa,
- Ikut-ikutan,
- Kesadaran sendiri.

Lebih lanjut dipertegas bahwa peran serta yang dilakukan dengan “takut/terpaksa” biasanya sebagai akibat dari adanya perintah yang kaku dari atasan/pemerintah, sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan peran

serta dengan "ikut-ikutan" hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat. Dan peran serta dengan timbulnya "kesadaran" yakni peran serta yang karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat.

Pada sisi lain peran serta masyarakat dalam penataan ruang kota yang dimaksudkan harus ditunjang dengan adanya dorongan kesadaran yang kuat dari anggota masyarakat. Selanjutnya dalam peran serta terdapat beberapa tingkatan yang dibagi oleh Hoofsteede dalam Ndraha, (1987 : 105), membagi peran serta menjadi tiga bagian mendasar yaitu ;

- a. Partisipasi Inisiasi (*Inisiation Participation*), yaitu bentuk partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemerintah, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat sendiri.
- b. Partisipasi Legitimasi (*Legitimation Participation*), adalah peran serta tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- c. Partisipasi Eksekusi (*Execution Participation*), adalah peran serta pada serta pelaksanaan.

Dari ketiga tingkatan di atas, partisipasi yang memiliki tingkat yang lebih tinggi adalah partisipasi inisiasi. Dalam bentuk partisipasi tersebut

masyarakat tidak hanya sekedar menjadi objek dari pembangunan saja, melainkan peran yang diambil dapat berupa menentukan dan bahkan mengusulkan segala rencana yang akan dilaksanakan.

B. Urgensi Peran Masyarakat

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 tentang Peranan Masyarakat Sebagai Pelaku Utama dalam Pembangunan, menegaskan bahwa peran serta masyarakat merupakan sentral point dalam pembangunan. Sebagai sentra point mutlak diperlukan untuk mempengaruhi arah pelaksanaan setiap program pembangunan.

Pendekatan yang paling sesuai untuk melibatkan mereka yaitu melalui pendekatan dari bawah keatas (*Bottom-up Approach*). Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat memperoleh banyak manfaat baik secara mikro maupun makro.

Secara mikro; arti penting peran serta masyarakat adalah :

1. Dapat mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat secara demokratis melalui pemecahan berbagai masalah yang timbul.
2. Dapat meningkatkan perasaan ikut memiliki setiap program pembangunan yang dijalankan.
3. Dapat mengontrol keputusan-keputusan yang mempengaruhi nasib mereka.

4. Dapat merupakan strategi untuk mendidik, mengembangkan keahlian, dan memperoleh pengetahuan baru.
5. Dapat mempertemukan keinginan-keinginan bersama dengan pemerintah.
6. Dapat meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama anggota masyarakat dan terhadap lingkungannya.

Secara makro, arti penting peran serta masyarakat adalah akan terbentuk nilai yang menjiwai masyarakat secara kolektif. Nilai kolektif tersebut akan merupakan nilai sosial sebagai hasil internalisasi dari pribadi-pribadi yang berlaku umum.

Menurut Rukmana dkk dalam Maria, (2000: 15), bahwa alasan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan sangat penting dan secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok : Pertama; alasan-alasan yang mengacu pada masyarakat yaitu bahwa masyarakat berhak untuk ikut terlibat dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka, berhak terlibat dalam keputusan-keputusan bagi keberadaan mereka sehari-hari dan masa depan mereka. Kedua; alasan yang berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi, yaitu bahwa jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan dan haknya untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan perkotaan, pembangunan diperkirakan akan berlangsung secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “*efektif dan efisien*” adalah tujuan-tujuan tertentu (misalnya peningkatan kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan ruang yang lebih baik) dapat benar-benar tercapai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan terlibatnya masyarakat dalam proses pembangunan khususnya pembangunan perkotaan, maka disamping memberikan kontribusi dalam upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas, juga menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang di rencanakan dalam lingkungan kota.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Peran Masyarakat

Relevansinya dengan peran masyarakat, ada beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan seperti: (1) Kebijakan lepas tangan, (2) Kebijakan pembatasan, dan (3) Kebijakan pendukung (Muhaimin dalam Maria, 2000 : 16).

a. Kebijakan Lepas Tangan

Dalam kebijakan ini, pemerintah secara resmi tidak mempunyai kegiatan atau program pembangunan dan tidak mengalokasikan dana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemerintah bersikap pasif.

Ada beberapa alasan yang diambil oleh pemerintah untuk memilih kebijaksanaan ini yaitu; pemerintah tidak memiliki dana yang cukup dan bahkan pemerintah ingin mngurangi atau meniadakan perannya sendiri dalam usaha pembangunan. Oleh karena itu masyarakat diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan gagasan sendiri dalam proses pembangunan, sikap yang demikian itu dapat mendorong dan memupuk rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap pembangunan; dan dalam praktek, usaha ini akan menggunakan mekanisme yang pada gilirannya masyarakat berperan serta karena didorong oleh rasa memiliki dan tanggungjawab bersama.

b. Kebijakan Pembatasan

Disini pemerintah bertindak aktif sebagai penanggungjawab usaha pembangunan. Sebagai penanggungjawab, pemerintah hanya mempunyai peran untuk merencanakan, memobilisasi dana, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian serta akhirnya memonitor, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan. Pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang pada umumnya ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu masyarakat berada dalam keadaan pasif bahkan seringkali menjadi “lawan” pemerintah dan dalam banyak kasus masyarakat bahkan tidak mempunyai hak apapun.

c. Kebijakan Mendukung

Kebijakan mendukung didasarkan pada :

- a) Kepercayaan bahwa masyarakat mempunyai potensi yang lekat dan oleh karena itu perlu dikaitkan dengan proses pembangunan nasional.
- b) Pengakuan akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, baik berupa finansial maupun sosial.
- c) Pengakuan bahwa pembangunan dengan melibatkan masyarakat bisa lebih murah.

Alasan yang dikemukakan pemerintah untuk memilih kebijakan ini adalah adanya potensi yang terpendam dalam masyarakat serta kelangkaan dana dan daya yang ada pada pemerintah. Kebijakan ini juga disebut kebijakan yang partisipatif karena pintu partisipatif/peran serta dibuka lebar bagi masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah.

Kondisi yang harmonis dan ideal seharusnya pemerintah bersama masyarakat berperan dalam mengerahkan dana dan daya yang ada karena itu ada penyebaran tanggungjawab dan rasa memiliki bersama. Pemerintah berperan menyediakan peraturan, memberikan bimbingan serta mendorong masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.

D. Penguatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Tantangan terbesar dalam proses penataan ruang kota adalah bagaimana memberdayakan atau menguatkan peran serta masyarakat agar mampu memenuhi tujuan untuk menciptakan kondisi pembangunan kota yang sehat, aman, serasi, dan produktif tanpa merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat perkotaan secara umum. Untuk itu, masyarakat perlu diperkenalkan pengertian tentang penataan ruang, diberikan akses dan stimulant, ditumbuhkan rasa peduli dan rasa tanggungjawab, yang pada akhirnya memunculkan bentuk partisipasi atas kehendak masyarakat sendiri sebagai benteng terakhir pengendali pemanfaatan ruang.

Di dalam Undang-Undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, pasal 4, disebutkan bahwa "Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang". Selanjutnya, setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana tata ruang.
- b. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Selain hak-hak di atas, melekat pula kewajiban masyarakat dalam penataan ruang seperti ditegaskan dalam pasal 5 UU No.24/1992, yakni:(a) setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan (b) setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

E. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Peran Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan oleh banyak faktor. Mubyarto dan Kartodirjo dalam Maria, (2000 : 25), mengemukakan bahwa faktor-faktor itu mengandung banyak variabel yang mempengaruhi derajat peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan; variabel-variabel tersebut dijabarkan dalam faktor-faktor yaitu faktor sosial ekonomi mencakup variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status pemilikan lahan dan penguasaan lahan/tanah, jumlah tanggungan keluarga, jumlah tenaga kerja keluarga dan tingkat kesehatan. Faktor sosial budaya mencakup variabel norma, nilai, kepercayaan, pengetahuan dan simbol. Faktor teknologi mencakup cara-cara dan alat-alat yang digunakan dan pelayanan penyuluhan (sosialisasi). Faktor *policy* pemerintah mencakup variabel sikap koordinatif, kepemimpinan lembaga sosial, pendekatan untuk memotivasi masyarakat, tingkat kebebasan untuk menyatakan pendapat dan keinginan-keinginan masyarakat.

Selanjutnya bahwa pengurusan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan aparat birokrasi membutuhkan suatu proses dan pelayanan yang baik dari aparat pemerintah. Pelayanan yang cepat yang dilayani secara otomatis akan memotivasi masyarakat untuk menyesuaikan suatu program atau aturan. Dengan demikian menurut Moenir dalam Maria, (2000: 26) efektifitas pelayanan merupakan faktor yang turut mempengaruhi peran serta masyarakat.

a. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan dalam arti spesifik yaitu pendidikan formal yang secara resmi dan melembaga baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta, yang dilaksanakan melalui suatu proses secara berjenjang/bertingkat.

Tingkat atau jenjang pendidikan mengindikasikan prasyarat kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang disertai dengan pengembangan nilai-nilai dan sikap kualitas hidup.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap sikap perilaku/persepsi seseorang, sebagaimana dikemukakan bahwa dengan pendidikan yang baik seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dan cepat tanggap terhadap inovasi. (Tjokroamidjojo dan Slamet dalam maria, 2000: 26)

Dengan demikian, maka diasumsikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima inovasi dan menyadari serta termotivasi untuk melaksanakannya.

b. Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil/upah yang diperoleh atau yang dinilai dengan uang. Kadirah dalam Maria, (2000: 27) mendefinisikan pendapatan sebagai penghasilan berupa uang/gaji, biaya, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam bidang waktu tertentu.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa pendapatan tidak terbatas pada upah/gaji semata, akan tetapi dapat berupa hasil sewa, deviden, maupun keuntungan dari suatu usaha.

Tinggi rendahnya tingkat pendapatan seseorang sangat ditentukan oleh pekerjaan yang ditekuninya. Pendapatan sangat urgen bagi seorang warga masyarakat yang ingin menjalani hidup dan kehidupannya, pengaruh tingkat pendapatan dapat terlihat pada kepedulian seseorang dalam mengikuti segala aktifitas yang dilakukan lingkungan sekitarnya. Kepedulian yang dimaksudkan adalah kepekaan masyarakat dalam melihat suatu proses perencanaan terutama pada kebijakan pemanfaatan ruang khususnya ruang kota tempat tinggalnya.

c. Status Masyarakat

Menurut Ralph Linton, Status social dalam masyarakat adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosial nya rendah.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Pada semua sistem sosial, tentu terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti anak, isteri, suami, ketua RW, ketua RT, camat, lurah, kepala sekolah, guru dan sebagainya.

d. Kedudukan Masyarakat

kedudukan masyarakat dalam penataan ruang sangat diperhatikan dengan di dukung aturan-aturan pelaksana terkait hak dan kewajiban, disertai mekanismenya dalam berpartisipasi. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang di Kota Surabaya dinilai cukup baik. Cukup baik yang dimaksud adalah terkait hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi. Terkait dengan ijin pemanfaatan ruang yang berasaskan asas legalitas membuat kegiatan pemanfaatan ruang

kebebasannya dibatasi, sehingga dapat diarahkan atau dikendalikan, dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi, serta melindungi objek-objek tertentu selama kegiatan pembangunan berlangsung.

e. Kelembagaan

Pada tingkat Nasional pemanfaatan ruang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), sedangkan pada tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi (TKPRD Propinsi) dan pada tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh TKPRD Kabupaten/Kota. Menteri terkait yang berada dalam wadah BKTRN dan Kepala Daerah yang dibantu oleh Bappeda dan TKPRD dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pemanfaatan ruang berperan dalam level dan tanggung jawab masing-masing untuk:

- Mengkoordinasikan proses sosialisasi dan adaptasi produk rencana tata ruang kepada warga masyarakat pada daerah peruntukan;
- Menerima dan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang;

- Menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pemanfaatan ruang;
- Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dengan menegakkan ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan koordinasi antara para pelaku dan penentu kebijakan bidang pembangunan dan penataan ruang di daerah, telah dilakukan beberapa hal seperti dengan dibentuknya Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dulu dinamakan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai suatu bentuk tim koordinasi bidang penataan ruang yang efektif dalam peningkatan peran pemerintah propinsi dalam mengkoordinasikan penataan ruang di daerahnya terutama untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan mengamankan berbagai kepentingan nasional.

F. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah dan Kota

Pada dasarnya proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia secara umum terus mengalami perubahan yang cukup signifikan, perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan hak atas kesempatan untuk berkembang bagi wilayah-wilayah khususnya untuk kawasan Indonesia bagian timur. Kesempatan yang diberikan itu tidak

terlepas dari peluang masyarakat untuk lebih jauh terlibat dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya sendiri, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah dan kota dapat dilaksanakan pada beberapa aspek yang secara sistematis dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat itu sendiri (Agoes, 1999: 3-5).

1. Aspek Perencanaan

Pada proses ini, kesempatan masyarakat dapat diposisikan dalam beberapa bagaian yaitu:

- Masyarakat dapat memberi masukan dalam penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pengembangan pembangunan wilayah dan kota.
- Ikut mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pembangunan.
- Memberikan masukan terhadap perumusan rencana program pembangunan wilayah dengan tahapan waktunya, dan sistem prasarana.
- Terlibat langsung dalam merumuskan investasi pembangunan wilayah dan kota.

- Membangun sistem kelembagaan dalam pengelolaan pembangunan.

Dalam proses pembangunan yang dilakukan tersebut, penentuan arah kebijakan pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus dapat mencerminkan kepentingan masyarakat, bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah dan kota setidaknya menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga dalam rangka pembentukan organisasi masyarakat dengan pengembangan mental yang pada akhirnya dapat meningkatkan sumberdaya manusianya (SDM). Upaya tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti meningkatkan aspek pendidikan, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan secara komprehensif dan kontinyu.

2. Aspek Pelaksanaan/ Implementasi

Peran serta masyarakat pada tahapan ini dapat mendukung proses pembangunan;

- Ikut serta dalam mengisi pembangunan di wilayah dan kotanya.
- Dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.
- Terlibat langsung dalam melakukan investasi pembangunan, dan pembuatan sarana dan prasarana pembangunan.

- Dapat menjalankan sistem kelembagaan dan terlibat langsung dalam menjalankan program yang telah dibuat dengan periode waktunya.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah dan kota dapat dilihat dengan terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat tersebut dalam mengisi pembangunan wilayahnya, bersama-sama dengan sektor terkait, swasta, pemerintah, serta investor. Masyarakat juga ikut serta dalam menikmati hasil-hasil yang telah dirintisnya sejak awal.

3. Aspek Pengawasan

proses pembangunan yang dilakukan tersebut di atas dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kontrol atau pengawasan yang baik pula;

- Adanya sistem administrasi yang jelas agar dapat dilakukan pengawasan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada.
- Peran aktif dari badan legislatif (dewan Kota) sebagai kontrol kegiatan pembangunan dan dapat memberikan evaluasi apabila terjadi penyimpangan.
- Adanya badan hukum (yudikatif) yang independen agar dapat memberikan masukan dalam kegiatan pembangunan.

- Keikutsertaan masyarakat melalui organisasi-organisasi lokal masyarakat dalam memberi pengawasan secara keseluruhan.

Kegiatan evaluasi tersebut di atas prosesnya juga sama dengan tahapan perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka diharapkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan akan semakin jelas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa

bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. (Sukmadinata, 2006). Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapatan yang berkembang, proses yang sedang berlangsung akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Dalam penelitian ini, tentang peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao.

Pendekatan "kualitatif" adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi. Proses penelitian tersebut

memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman persepsi peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Rantepao dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kedudukan wilayah kecamatan yang menjadi pusat pelayanan barang dan jasa baik bagi penduduk Kota Rantepao maupun yang berada di daerah hinterlandnya.
- Kota Rantepao sebagai akses wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara.
- Kabupaten ini semulanya adalah kabupaten Tana Toraja yang telah dimekarkan sehingga terbentuknya Toraja Utara, pemekaran ke-24 di Sulawesi selatan ini merupakan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan sejak tujuh tahun lalu, sudah layak berotonomi karena ditunjang potensi obyek wisata budayanya yang mendunia dan sumber daya alam (SDA) pertanian dan perkebunan kopi serta lain-lain.

Dalam kajian mengenai tingkat peran masyarakat yang akan dilakukan ini, untuk dapat menggambarkan karakteristik masyarakat

dalam penataan ruang kota secara keseluruhan. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui bagaimana masyarakat dengan kondisi tersebut dapat mengambil perannya dalam proses penataan ruang di Kota Rantepao, maka kriteria lokasi tersebut diarahkan pada :

- Lokasi penelitian berada dalam wilayah kota sehingga dapat mencerminkan keadaan (sosial, ekonomi dan budaya) masyarakat Kota Rantepao.
- Lokasi penelitian adalah wilayah pusat pelayanan kota yang diarahkan pada *Central Business Distrik (CBD)* di Kecamatan Toraja Utara, sehingga informasi yang diperoleh akan lebih variatif.

Pengelompokkan tersebut di atas dimaksudkan untuk dapat menentukan kelurahan yang akan dijadikan lokasi pengambilan data dengan tujuan dapat mewakili karakteristik masyarakat Kota Rantepao secara keseluruhan, maka kelurahan yang menjadi lokasi pengambilan data adalah Kelurahan Malanggo dengan jumlah penduduknya .940 jiwa di Kecamatan Rantepao Toraja Utara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai objek tersebut. Kegiatan observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara yang didasarkan pada pedoman observasi berupa daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.

2. Survei

Metode pengumpulan data dengan melakukan tinjauan langsung terhadap ke beberapa tempat yang dianggap layak dapat memberikan informasi mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota Rantepao. dan Penyebaran angket atau kuisisioner (daftar Pertanyaan) yang dilakukan langsung terhadap objek penelitian yang bertujuan mengetahui informasi mengenai suatu masalah dimana responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada dokumen

berupa benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar atau dengan kata lain data yang bukan berupa angka. Adapun data yang dimaksud adalah data karakteristik masyarakat kota yang meliputi tingkat pemahaman terhadap penataan ruang kota dan tanggapan terhadap produk Rencana Tata Ruang Kota Rantepao.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data numeric. Data yang dikumpulkan adalah data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, luas wilayah, kondisi topografi dan kelerengan, hidrologi, geologi dan jenis tanah, penggunaan lahan, dan jumlah sarana dan prasarana sebagai data penunjang, serta data lain yang terkait dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang menjadi input penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, yang meliputi tingkat pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang kota dan tanggapan terhadap produk Rencana Tata ruang Kota Rantepao. Cara memperoleh datanya adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh pada instansi terkait. Cara memperolehnya dengan mendatangi langsung instansi-instansi terkait. Salah satu teknik penyaringan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian jenis data yang dimaksud meliputi :
 - a. Data kondisi fisik wilayah studi yang mencakup letak geografis, kondisitopografi, kelerengan, geologi dan hidrologi.
 - b. Data kependudukan dengan spesifikasi data berupa jumlah penduduk, kepadatan penduduk, perkembangan dan penyebaran penduduk.
 - c. Prasarana dan sarana, meliputi jenis dan persebaran fasilitas yang ada.

- d. Data tentang kebijakan pemerintah setempat mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang Kota Rantepao.

Adapun data sekunder yang diperoleh melalui :

- a) BPS Kabupaten Toraja Utara
- b) Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toraja Utara.
- c) Kantor Kecamatan Rantepao.
- d) Kantor Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara

E. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang memiliki variasi antara satu objek dengan objek lain dalam kelompok tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang secara substansial dapat menjadi kerangka pembahasan yaitu;

1) Variabel Pengaruh X (Independen Variable)

Adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruh) variabel tidak bebas.

- 1. Tingkat Pendidikan X_1**
- 2. Tingkat Pendapatan X_2**
- 3. Status Masyarakat X_3 .**

4. **Kedudukan Masyarakat.**

5. **Kelembagaan.**

2) **Variabel Terpengaruh (Y) (Dependen Variable)**

Peran masyarakat dalam proses penataan ruang kota.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif meliputi :

- Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Adapun statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif untuk menjawab rumusan masalah deskriptif yang telah disusun. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Analisis data yang akan dilakukan sesuai urutan berikut:

1) Mengelompokkan data berdasarkan variabel

- 2) Mentabulasi data berdasarkan variabel
- 3) Menyaikan data
- 4) Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah
- 5) Jika hipotesis deskriptif dirumuskan maka perlu diuji. Dalam penelitian ini karena tidak dirumuskan hipotesis deskriptif, berdasarkan sumber buku “Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” karya Sugiyono (2008), analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara melakukan perhitungan sehingga setiap rumusan masalah dapat ditemukan jawabannya secara kuantitatif. Kemudian hasil perhitungan disajikan dalam bentuk grafik batang.

- Analisis Regresi Linier digunakan Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan metode analisis uji regresi berganda, persentase semua pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap nilai variabel terikat serta pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap nilai variabel terikat. Untuk menentukan ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji statistik koefisien regresi. Model regresi liniernya adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Dimana :

Y = Peran Masyarakat dalam proses penataan ruang kota.

X1 = Tingkat Pendidikan

X2 = Tingkat Pendapatan

X3 = Status Masyarakat

X4 = Kedudukan Masyarakat

X5 = Kelembagaan

a = konstanta

b1, b2, dan b3 = koefisien regresi

e = standar error.

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas secara simultan, dapat dilihat hasil uji koefisien korelasi multiple R sedangkan tingkat pengaruh dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi R². sedangkan signifikan tidaknya pengaruh tersebut dapat dilihat dari hasil Uji – F serta tingkat probabilitas dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$.

Jika Uji – F > F – tabel dan probabilitas < $\alpha 0,05$ maka ada pengaruh, sehingga hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, selanjutnya, jika Uji – F < F - tabel dan

probabilitas $> \alpha 0,05$ maka tidak ada pengaruh maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Di samping itu juga dapat dilakukan uji - t (uji - student) yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel tidak bebasnya dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$.

Jika Uji - t $> t$ - tabel dan probabilitas $< \alpha 0,05$ maka ada pengaruh sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Selanjutnya jika uji = $t < t$ = tabel probabilitas $> \alpha 0,05$ maka tidak ada pengaruh, Sehingga hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis (H_a) ditolak.

G. Definisi Operasional

Beberapa definisi yang menjadi dasar pemahaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan di Kota Rantepao sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan, adalah tingkat atau jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti responden yang menjadi dasar dalam menentukan tingkat pemahaman dan kesadaran responden akan pentingnya penataan ruang kota.

2. Tingkat Pendapatan, adalah total penghasilan berupa barang dan jasa yang dinilai dengan uang (Rp) yang diperoleh responden baik suami maupun isteri melalui pekerjaan pokok/tambahan per bulan.
3. Status Masyarakat adalah untuk menjaga kualitas ruang dengan mematuhi dan metaati segala ketentuan normatif yang telah ditentukan dalam peraturan terkait. Dan sebagai proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah yang secara langsung dapat memperbaiki kapasitas mereka dalam mencapai kesepakatan.
4. Kedudukan Masyarakat adalah sebagai pemangku kepentingan non pemerintahan dalam penataan ruang, yang pelaksanaannya dilakukan secara kordinasi.
5. Kelembagaan adalah pembentukan forum kota,asosiasi profesi,media massa,LSM, lembaga formal kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat) yang mengajukan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toraja Utara

1. Aspek Fisik Dasar

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 1.151,47 km² atau sebesar 2,5% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km²), secara yuridis terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Secara geografis, Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur.

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) kecamatan dan terdiri dari 111 desa dan 40 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km². Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km² dan 131,72 km² atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen

Dari seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, dimana baru terbentuk sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2008. Dengan batas wilayah:

- sebelah utara: Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Limbongan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

- Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Lamasi, Kecamatan Walenrang, Kecamatan Wana Barat, dan Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara, kecamatan Makale Utara, dan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja.

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kurra, Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja dengan luas wilayah mencapai 1.151,47 km persegi, adapun yang meliputi Kecamatan di Toraja Utara yaitu 21 Kecamatan dengan luas sebagai berikut

PETA

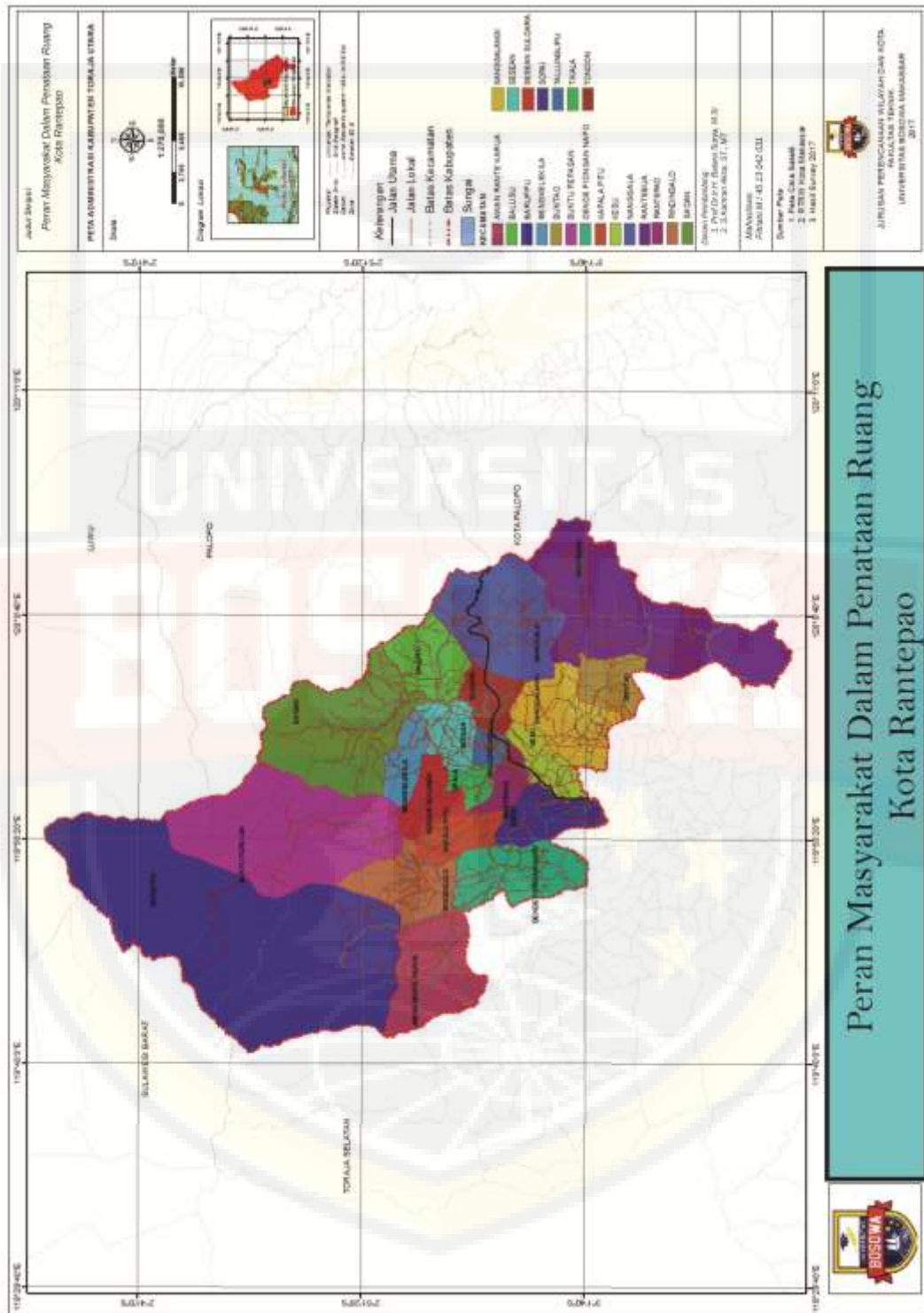


Table 4.1

Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017

Luas per-Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Kecamatan	Luas Area (Km2)
Sopai	47,64
Kesu	26,00
Sanggalangi	39,00
Buntao	49,50
Rantebua	84,84
Nanggala	68,00
Tondon	36,00
Tallunglipu	9,42
Rantepao	10,29
Tikala	23,44
Sesean	40,05
Balusu	46,51
Sa'dan	80,49
Bangke Kila	21,00
Sesean Suloara	21,68
Kapalapitu	47,27
Dendeng Piongan	77,49

Awan Rante Karua	54,71
Rindingallo	74,25
Buntu Pepasan	131,72
Baruppu	162,17
Jumlah	1.151,47

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

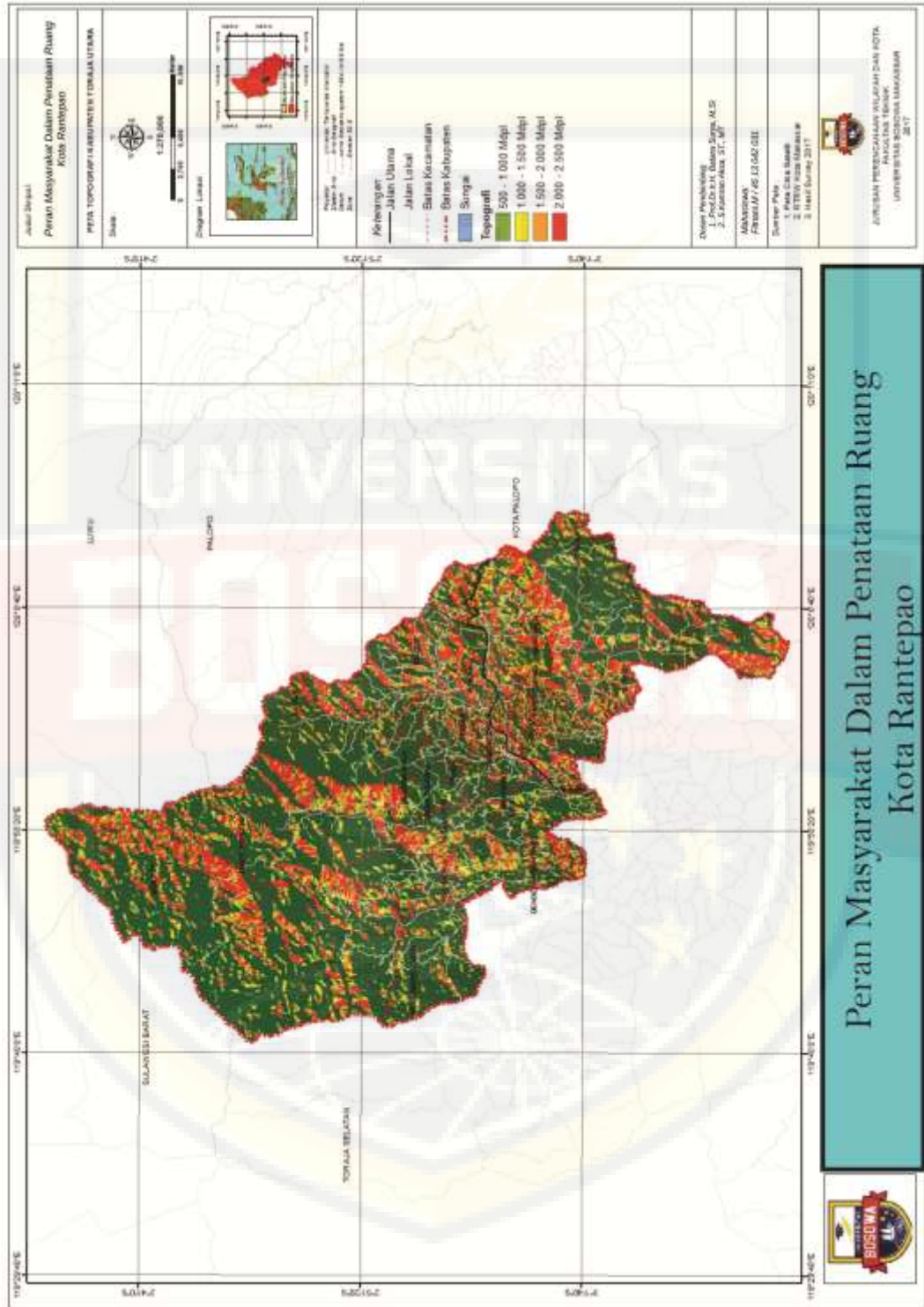
Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 Km persegi dan 131,72 Km persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara.

b. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara secara umum merupakan daerah ketinggian dan merupakan daerah kabupaten/kota yang kondisi topografinya paling tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan daerah ini tidak memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah ketinggian. Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara terdiri dari empat kelompok sebaran besar, yakni :1)sebaran ketinggian 500-1.000 m dpl, 2) sebaran ketinggian 1.000-1.500 m dpl, 3) sebaran ketinggian 1.500-2.000 m dpl, 4) sebaran ketinggian 2.000-2.500 m dpl. Untuk sebagian wilayah tengah sampai ke daerah selatan memiliki

ketinggian dominan kelompok 500-1.000 m dpl, yang didalamnya termasuk sebagian Kecamatan Rantepao, Sesean, Tallunglipu, Kesu, Tondon, Balusu, sebagian Nanggala, Sanggalangi, Buntao, dan sebagian Rantebua. Sementara untuk tengah – ke utara dominan pada ketinggian 1.000-1.500 m dpl, yang didalamnya terdiri dari Kecamatan Kapala Pitu, Tikala, sebagian Sesean Suloara, sebagian Sa'dan, sebagian Rindingallo. Di bagian utara dimana terdapat Kecamatan Buntu Pepasan dan Kecamatan Baruppu memiliki ketinggian dominan 2.000-2.500 m dpl. Selengkapnya mengenai kondisi topografi wilayah Kabupaten Toraja.

PETA



c. Kondisi Jenis Tanah

Struktur geologi wilayah Kabupaten Toraja Utara terbentuk dari beberapa formasi batuan yang didominasi oleh formasi batuan gunungtalaya yang tersebar seluas 50.014 ha atau sebesar 43,43%, selanjutnya sebaran struktur geologi lainnya yang cukup besar terbentuk dari formasi serpih seluas 28.564 ha atau sebesar 24,81%, lalu formasi batuan gunung lamasi seluas 11.400 ha atau sebesar 9,90%. Formasi sebaran batuan gunung talaya berada di bagian utara wilayah Kabupaten Toraja Utara yang meliputi Kecamatan Baruppu, Rindingallo, Awan Rante Karua, dan sebagian Buntu Pepasan.

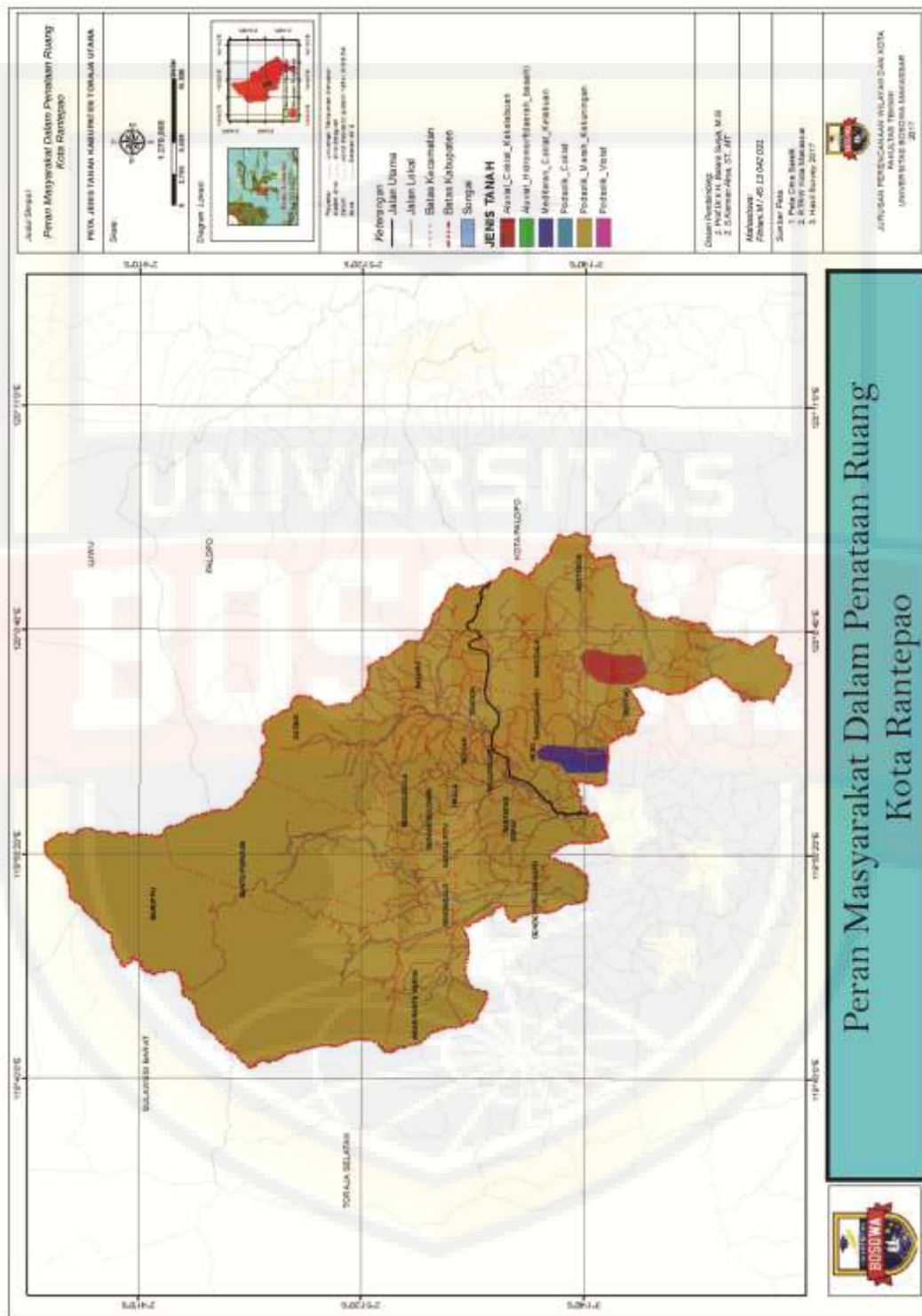
Sebaran terbesar kedua lainnya yakni formasi serpih berada di bagian selatan yang meliputi Kecamatan Nanggala, Rantebua, Buntao, dan sebagian Sanggalangi, Tondon, dan Balusu. Selengkapnya mengenai jenis dan sebaran luasan formasi geologi wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Klasifikasi fisik wilayah dari aspek jenis tanah di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana hasil interpretasi foto citra landsat 2007, dan peta RBI Bakosurtanal menunjukkan bahwa jenis tanah podsolik violet cukup dominan yakni seluas 59.996 ha atau sebesar 52,10%, kemudian hamparan jenis tanah podsolik merah kekuningan seluas 34.824 ha atau sebesar 28,65%, lalu jenis tanah

aluvial hidromorf (daerah basah) seluas 17.044 ha atau sebesar 14,80%. Selengkapnya mengenai kondisi sebaran jenis tanah di Wilayah Kabupaten Toraja Utara.



PETA



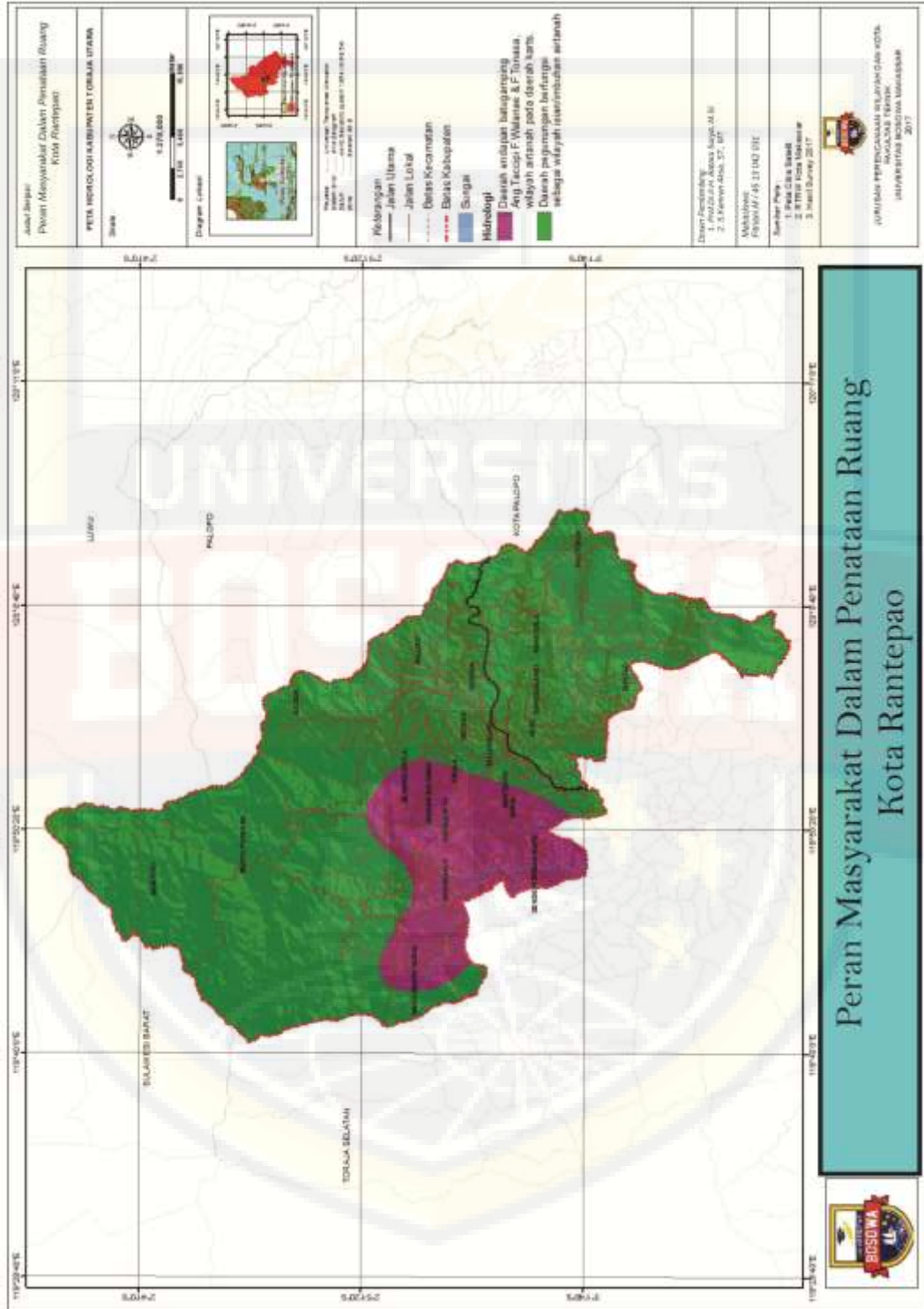
d. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi hidrologi di kawasan ini juga terdapat sungai yang besar yaitu Sungai saddang yang melintasi kabupaten Toraja Utara. Sungai tersebut umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah tangga.

Air merupakan salah satu komponen lingkungan paling penting untuk kehidupan, tanpa air proses kehidupan tidak akan berlangsung. Di Kabupaten toraja utara, akses terhadap air bersih sering menjadi masalah, kualitas air saat ini tidak terlepas dari masalah. Masuknya bahan ke dalam sumber air permukaan maupun air tanah menyebabkan kualitas air tidak sesuai lagi untuk berbagai keperluan termasuk keperluan air minum.

Sungai Saddang adalah air permukaan yang merupakan salah satu sumber mata air. Sungai Saddang merupakan sungai terbesar di Kabupaten toraja utara yang mengalir ditengah-tengah kota untuk di manfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

PETA



2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumberdaya alam sangat memberikan kontribusi besar bagi sebuah wilayah, dimana dapat dikelola agar dapat dijaga kelestariannya untuk menstabilkan keseimbangan lingkungan serta dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Kajian potensi sumberdaya alam di Kabupaten Toraja Utara cukup bervariasi, sebagai salah satu potensi yang harus dijaga dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah tersebut.

a. Kondisi Pertanian

Produksi padi Kabupaten Toraja Utara tahun 2016 sebesar 4.360.89 Ton yang di panen dari areal seluas 15.342 Ha. Tanaman lain yang berproduksi adalah ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Berdasarkan data BPS Kabupaten Toraja Utara menunjukkan Kecamatan Rantebua adalah wilayah dengan produksi hasil pertanian tanaman pangan tertinggi dengan nilai produksi 548.00 Ton, Kapalapitu 85.00 Ton, dan tertinggi ketiga ada di Kecamatan Buntao sebanyak 42.00 Ton, dan wilayah dengan produksi tanaman pangan terendah adalah Kecamatan Kesu 2 Ton, dan Kecamatan yang tidak menghasilkan tanaman

pangan yaitu Kecamatan Tondon, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Balusu, Kecamatan Bangke Kila', dan Kecamatan Baruppu'. Maka dengan demikian berdasarkan data statistic jelas menunjukkan bahwa Kecamatan Rantebua merupakan wilayah dengan produksi tanaman pangan tertinggi di bandingkan Kecamatan lainnya sehingga Kecamatan rantebua wilayah terproduktif

b. Kondisi Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu kegiatan usaha yang dikembangkan oleh masyarakat, dan memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB di Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan data BPS Kab. Toraja Utara, dengan jumlah produksi kurang lebih 8149,25 Ha. Jumlah produksi yang memberikan kontribusi cukup besar dan mengalami pertumbuhan yang terus meningkat adalah komoditi Kopi Arabika 3919.03 Ton, dan Kopi Robusta 549.9 Ton, sedangkan komoditas yang produksi terendah adalah Kapuk sebanyak 1.28 Ton, dan Vanili 13,98 Ton.

c. Kondisi Perikanan

Jenis budidaya perikanan yang diusahakan di Kabupaten Toraja Utara adalah budidaya Perairan Umum, Kolam, dan Sawah.

Potensi pengembangan perikanan di Kabupaten Toraja Utara cukup kecil karena wilayah pesisir.

Sektor perikanan budidaya (darat) di Kabupaten Toraja Utara hingga tahun 2015 memanfaatkan lahan sekitar 2.350 Ha, dengan total produksi mencapai 3334.30 Ton. Tingkat produksi perikanan budidaya didominasi oleh pengelolaan sawah dengan jumlah produksi tertinggi selama tahun 2015 yaitu 3.225.00 Ton, dan ikan kolam memproduksi sebanyak 114.30 Ton.

3. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Laju Dan Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil Sensus tahun 2012 berjumlah 220.304 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 26.005 jiwa mendiami Kecamatan Rantepao.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing 111.362 jiwa penduduk laki-laki dan 108.912 jiwa penduduk perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 102%, ini berarti, dari setiap 100 orang perempuan terdapat 102 laki-laki.

Kepadatan penduduk di kabupaten toraja utara pada tahun 2014 telah mencapai 191 jiwa/km². kecamatan terpadat di kecamatan rantepao, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.527 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah kecamatan baruppu dan buntu pepesan, yaitu 34 dan 94 jiwa/km². Dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.2

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di kabupaten toraja utara tahun 2015-2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan %
		2015	2016	2017	2015-2017
1	Sopai	13,526	13,042	13,256	1.36
2	Kesu	15,291	15,504	15,757	2.24
3	Sanggalangi	11,663	11,129	11,311	2.01
4	Buntao	9,385	8,911	9,056	1.88
5	Rantebua	9,496	7,595	7,719	1.33
6	Nanggala	10,074	9,192	9,341	1.55
7	Tondon	9,737	9,465	9,618	0.83

8	Tallunglipu	15,761	18,068	18,364	1.14
9	Rantepao	25,805	25,585	26,005	4.02
10	Tikala	11,024	10,275	10,442	1.51
11	Sesean	11,024	10,893	11,070	2.58
12	Balusu	7,766	5,760	6,338	0.73
13	Sa'dan	14,720	14,923	15,167	4.68
14	Bangkele Kila	5,837	5,128	5,212	1.33
15	Sesean Suloara	6,172	6,236	6,338	1.66
16	Kapala Pitu	6,957	6,041	6,140	1.33
17	Denpina	9,937	7,979	8,109	2.46
18	Awan R. Karua	4,926	5,195	5,279	1.14
19	Rindingalo	8,729	7,255	7,375	0.97
20	Buntu Pepasan	13,892	12,228	12,428	3.67
21	Baruppu	6,674	5,358	5,446	0.04
		229,090	216,762	220,304	1.61

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Toraja Utara dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di kabupaten Toraja utara. Kecamatan Rantepao memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi dengan jumlah penduduk 26.005 dengan laju pertumbuhan 4.02%. Sedangkan kecamatan Bangkele Kila memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya dengan jumlah penduduk 5.212 dengan laju pertumbuhan 1.33%.

b. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Toraja Utara tahun 2017 hampir sama dengan daerah-daerah lainnya dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki masih lebih banyak yakni berjumlah 118.257 jiwa, sementara penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 108.221 jiwa. Hal ini tercermin pula dari angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 109%, yang berarti dari setiap 100 orang perempuan terdapat 109 orang laki-laki.

Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Toraja Utara terlihat jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-60 tahun) lebih rendah dibanding dengan kelompok umur non produktif (0-14, > 60 tahun). Data tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk produktif sebanyak 112.443 jiwa atau sebesar 49,65%,

sementara penduduk non produktif sebanyak 114.035 jiwa atau 50,35%. Selengkapnya mengenai struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3.
Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
di kabupaten toraja utara tahun 2017

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4	12.889	11.611	24.500
2	5 – 9	18.060	16.612	34.672
3	10 – 14	19.371	15.849	35.220
4	15 – 19	14.574	11.590	25.164
5	20 – 24	7.620	6.593	14.213
6	25 – 29	5.813	6.017	11.830
7	30 – 34	5.870	6.455	12.325
8	35 – 39	5.884	4.953	10.839
9	40 – 44	5.663	6.366	12.029
10	45 – 49	5.187	4.213	9.400
11	50 – 54	4.377	5.987	10.364

12	55 – 59	2.991	2.288	5.279
13	60 – 64	3.097	3.174	6.271
14	65 +	6.861	6.511	13.372
Jumlah		118.257	108.221	226.478

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Toraja Utara dalam Angka Tahun 2017

c. Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 1.151,47 km² atau sebesar 2,5% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km²), secara yuridis terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Secara geografis, Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur.

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) kecamatan dan terdiri dari 111 desa dan 40 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Torja Utara tercatat 1.151,47 KM persegi. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 KM persegi

Tabel 4.4**Sebaran Dan Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan****Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017**

No	Kecamatan	Luas Km ²	Jumlah Kel.+ Desa	Penduduk	Kepadatan (jiwa/Km ²)
1	Sopai	47,64	8	13.372	290
2	Kesu	26,00	7	15.116	504
3	Sanggalangi	39,00	6	11.531	180
4	Buntao	49,50	6	9.277	142
5	Rantebua	84,84	7	9.387	92
6	Nanggala	68,00	9	9.959	161
7	Tondon	36,00	4	9.627	239
8	Tallunglipu	9,42	7	15.580	680
9	Rantepao	10,29	12	25.510	1668
10	Tikala	23,44	7	10.899	334
11	Sesean	40,06	9	11.549	233
12	Balusu	46,51	7	7.678	128
13	Sa'dan	80,49	10	14.552	182

14	Bangkele Kila	21,00	4	5.805	164
15	Sesean Suloara	21,68	5	6.102	209
16	Kapala Pitu	47,27	6	6.878	123
17	Denpina	77,49	8	9.824	127
18	Awan R. Karua	54,71	4	4.870	89
19	Rindingalo	74,25	9	8.630	293
20	Buntu Pepasan	131,72	13	13.734	222
21	Baruppu	162,17	4	6.598	143
	Jumlah	1.151,47		226.478	197

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Toraja Utara dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas sebaran dan kepadatan penduduk dirinci perkecamatan. Kecamatan Rantepao memiliki kepadatan paling tinggi berjumlah 1668 (jiwa/Km²). Dan kecamatan Awan R. Karuan memiliki kepadatan paling rendah berjumlah 89 (jiwa/Km²).

d. Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Penduduk Kabupaten Toraja Utara terdiri dari empat (4) agama yaitu Islam, Protestan, Khatolik, dan Hindu, dimana mayoritas penduduk pada Kabupaten Toraja utara adalah beragama

Protestan sebesar 108.626 jiwa,.dapat dilihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5

**Penduduk Berdasarkan Agama pada KabupatenToraja Utara
Tahun 2017**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	18.967
2	Protestan	108.626
3	Katolik	94.656
4	Hindu	128
5	Budha	-
Jumlah		222.377

Sumber : Kantor BPN Kabupaten Toraja utara, Tahun 2017.

B. Gambaran Umum Kota Rantepao

1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak Geografis

Wilayah Kawasan Perkotaan Rantepao merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yaitu melintang dari utara ke selatan $2^{\circ} - 3^{\circ}$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} - 120^{\circ}$ Bujur Timur Bujur Barat. Dengan luas wilayah adalah 1.029 Ha. Dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tikala.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kesu.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tallunglipu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sopai.

Kecamatan terpadat kabupaten Toraja utara terdapat di Kecamatan Rantepao, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.503 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Baruppu dan Awan Rante Karua, yaitu 41 dan 90 jiwa/km².

b. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah administrasi Kawasan Perkotaan Rantepao sebagian besar merupakan daerah berbukit. Daerah lereng kaki bukit yang mengelilingi Kawasan Perkotaan Rantepao berada pada ketinggian antara 25 – 500 meter dari permukaan laut. Sedangkan kemiringan lereng pada wilayah penelitian berdasarkan data yang diperoleh terbagi atas tiga yaitu kemiringan 5 – 15%, 15 – 25%, 25 – 40%. Melihat kondisi tersebut sebagian besar dari daerah Kawasan Perkotaan Rantepao, yakni kemiringan 5-25% cocok untuk

dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari masyarakat Toraja Utara.

Tabel 4.6
topografi dan kemiringan lereng di kawasan perkotaan
Rantepao

no	Kelerengan (%)	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	5 – 15	333	32.36
2	15 – 25	461	44.80
3	26 - 40	235	22.83
jumlah		1.029	100

Sumber : Kantor BPN Kabupaten Toraja utara, Tahun 2017.

c. Kondisi Jenis Tanah

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk regolit yaitu lapisan partikel ada beberapa jenis tanah yaitu namun ada beberapa pembagian tanah yakni tanah vulkanis diantaranya tanah andosol, tanah regosol, tanah aluvial, kemudian tanah organosol diantaranya tanah humus, tanah gambut, selainnya tanah litosol, tanah podzol, tanah laterit, tanah mergel, tanah terarosa dll.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Kota Rantepao ditutupi oleh jenis tanah padosolik violet dan entisol, yang memungkinkan tanaman tumbuh dengan subur di daerah tersebut.

d. Kondisi Hidrologi

➤ Air Permukaan

Sumber daya air disamping berfungsi untuk kehidupan sehari-hari juga berfungsi untuk berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia seperti pertanian, perikanan, perindustrian, pembangkit tenaga listrik dan sebagainya, yang mempengaruhi keadaan hidrologi yaitu curah hujan, tipe iklim dan sungai. Maka pemerintah serta masyarakat perlu menjaga ketersediaan sumber air yang ada dengan menerapkan kebijakan yang mendorong pelestarian kawasan hijau. Yang menjadi sumber ketersediaan Air, Untuk Kota Rantepao terdapat air permukaan berupa air PDAM yang masih jarang digunakan, Sungai dan genangan Temporer.

➤ Air tanah dalam

Air tanah dalam adalah bagian air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama di semua tempat. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah

tersebut. Kota Rantepao air tanah dalam berupa sumur gali, sumur gali merupakan sumur yang paling banyak digunakan oleh warga Kota Rantepao berdasarkan badan statistika Kota Rantepao dalam angka tahun 2017.

e. Iklim dan Curah Hujan

Keadaan iklim dalam suatu wilayah dapat diidentikkan dengan mengenali kondisi curah hujan, penguapan, suhu atau temperatur, serta arah dan kecepatan angin.

Keadaan iklim di wilayah studi pada umumnya sama dengan iklim yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi terjadi antara bulan November sampai maret dimana pada bulan tersebut angin barat yang bertiup dari Asia dan Samudera Pasifik banyak mengandung uap air. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai Oktober dimana antara bulan tersebut angin timur yang bertiup dari Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April arah angin tidak menentu demikian pula curah hujan di wilayah ini umumnya tidak merata, hal ini menimbulkan adanya wilayah basah. Wilayah basah dengan curah hujan antara rata-rata 1500-2000 mm/tahun umumnya Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.7:

Tabel 4.7

Jumlah Curah Hujan di Kota Rantepao Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (m)	Jumlah Hari Hujan
1.	Januari	77	9
2.	Februari	186	14
3.	Maret	98	6
4.	April	127	14
5.	Mei	189	14
6.	Juni	355	19
7.	Juli	45	4
8.	Agustus	45	7
9.	September	40	4
10.	Oktober	-	-
11.	November	76	7
12.	Desember	372	19

Sumber : BPS Kabupaten Toraja utara, Tahun 2017

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Produksi Pertanian

Produktivitas pertanian di Kota Rantepao mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini terjadi akibat semakin sempitnya lahan

pertanian yang akan dikelola oleh petani. Di Kota Rantepao untuk pertaniannya adalah jumlah produksi padi tahun 2015 adalah 3.589,00 ton dari 680 hektar panen bersih, dibandingkan tahun 2016 adalah 3.394.00 ton, dari 680 hektar maka diketahui bahwa produksi tersebut mengalami penurunan. Selain dari pada itu terdapat beberapa jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kota Rantepao yaitu padi, jagung, ubi Jalar. Perlu diketahui bahwa produksi utama Kota Rantepao adalah padi. Yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8

Luas tanam, luas panen dan produksi menurut jenis tanaman di Kota Rantepao tahun 2017

No	Jenis tanaman	Luas panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Jagung	600	45.50	4.55
2	Padi Sawah	418	49.76	3,394.00
3	Kacang Tanah	0	0	0
4	Ubi Kayu	200	184.00	55.00
5	Ubi Jalar	3.00	152.10	46.00
6	Kacang Hijau	0	0	0

Jumlah	1,518	431.36	3.499.55
--------	-------	--------	----------

Sumber :Kota Rantepao dalam angka 2017

3. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Jumlah Penduduk

Penduduk di Kota Rantepao tersebar dalam 11 Kelurahan. Kelurahan Malango adalah kelurahan yang memiliki jumlah penduduk yang tertinggi yakni 5.025 jiwa. Sedangkan ditinjau berdasarkan luas wilayah, maka Kelurahan Limbong merupakan Kelurahan terluas di Kota Rantepao yakni 2,56 km². Adapun kepadatan penduduk tiap lingkungan di Kota Rantepao dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9

Kepadatan penduduk di Kota Rantepao

No	Kelurahan	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan penduduk (jiwa/Km ²)
1	Saloso	1.501	1.28	1.172.66
2	Limbong	1.499	2.56	585.55
3	Mentirotik	4.458	2.40	1.857.50
4	Laang tanduk	2.013	2.52	789.81
5	Singki	1.885	0.16	11.781.25

6	Karassik	1.638	0.17	9.635.29
	Rantepao	2.161	0.18	12.005.56
8	Rante pasele	1.960	0.22	8.909.09
9	Pasele	3.208	0.20	16.040.00
10	Malanggo	5.025	0.43	11.686.05
11	Penanian	1.463	0.17	8.605.88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara tahun 2017

b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Distribusi penduduk menurut jenis kelamin di Kota Rantepao secara umumnya sangat bervariasi yang kemudian tersebar pada seluruh wilayah kelurahan dan desa yang ada. Jumlah penduduk di Kota Rantepao pada tahun 2016 sebesar 26.811 jiwa dan tersebar di 11 wilayah kelurahan. Sedangkan jumlah kepala keluarga adalah 5.859 KK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga (Kk) Dirinci Per Kelurahan Tahun 2016

No	Kelurahan/Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	KK
		Laki-laki	Perempuan		

1.	saloso	746	755	1501	261
2.	Limbong	737	762	1499	425
3.	Mentirotik	2210	2248	4458	835
4.	Laang tanduk	1015	998	2013	439
5.	Singki	909	976	1885	532
6.	Karassik	793	845	1638	340
7.	Rantepao	953	1208	2161	408
8.	Rante pasele	898	1062	1960	424
9.	Pasele	1589	1619	3208	674
10.	Malango	2465	2560	5025	1082
11.	penanian	684	779	1463	439
Jumlah		12.999	13.812	26.811	5.859

Sumber : Kecamatan Rantepao Dalam Angka, Tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel 4.10 di atas, maka dapat dilihat perbedaan komposisi jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kecamatan Rantepao dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 12.999 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 13.812 jiwa dan jumlah penduduk terbesar berada pada Kelurahan Malango yaitu sebesar 5.025 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 5.859 KK.

4. Potensi Sumber Daya Buatan

Dalam rangka pembangunan dan peningkatan kualitas hidup manusia, maka ketersediaan akan sarana dan prasarana perkotaan seperti fasilitas pendidikan, perdagangan, kesehatan, perkantoran, peribadatan dan sarana olahraga, air bersih, listrik, persampahan, drainase dan sebagainya sangat diperlukan sebagai wujud daripada pemerataan pembangunan disegala aspek kehidupan, sehingga pada pembahasan ini akan diuraikan data-data mengenai sebaran sarana dan prasaana di kawasan perencanaan

a. Fasilitas Pemerintah

Fasilitas pemerintahan atau kantor pemerintahan yang ada di Kota Rantepao antara lain kantor bupati,kantor camat, kantor lurah, sektor polisi, dinas- dinas pemerintahan lainnya dimana perkantoran tersebut melayani lingkup Kabupaten Maupun Kota Rantepao.

b. Fasilitas Perdagangan

Fasilitas perdagangan merupakan tempat/wadah dalam rangka melangsungkan proses jual beli baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder penduduk. Adapun distribusi penyebaran fasilitas perdagangan yang ada di Kota Rantepao terdiri dari pasar yang berada pada di pusat ibu kota kabupaten dan kios dan warung yang terletak di seluruh wilayah kelurahan.

c. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang terdapat di Kota Rantepao yaitu Gereja yang memiliki jumlah 34 unit dengan gereja Protestan 32 unit dan Gereja Katolik 2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

**Jumlah fasilitas peribadatan dirinci per kelurahan
di Kecamatan Kapalapitu tahun 2017**

No	Kelurahan	Gereja	Masjid	Vihara	Kuil/ Klenteng
1	Benteng Kado	4	-	-	-
2	Benteng Mamullu	5	-	-	-
3	Kantun Poya	4	-	-	-
4	Kapala Pitu	8	-	-	-
5	Polo Padang	7	-	-	-
6	Sikuku	6	-	-	-
Jumlah		34	-	-	-

Sumber :Kecamatan Kapalapitudalam angka 2017

d. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Rantepao Cukup memadai, karena Terdapat rumah sakit maupun rumah sakit bersalin dan posyandu yang ada di setiap kelurahan di Kota Rantepao. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11

Jumlah fasilitas kesehatan dirinci per kelurahan

di Kota Rantepao tahun 2017

No	Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit Bersalin	Posyandu
1	Saloso	-	-	-	2
2	Limbong	-	-	-	3
3	Mentirotik	-	-	-	3
4	Laang tanduk	-	1	-	2
5	Singki	-	-	-	1
6	Karassik	-	-	1	1
7	Rantepao	1	-	1	2
8	Rante pasele	-	1	1	2
9	Pasele	-	-	-	2
10	Malanggo	-	-	-	1
11	penanian	-	-	-	1
Jumlah		1	2	3	20

Sumber :Kota Rantepao dalam angka 2017

e. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kota Rantepao terdiri dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/. Dan perguruan tinggi. Dimana jumlah SD lebih banyak dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu 14 unit SD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Jumlah fasilitas pendidikan dirinci per kelurahan
di Kota Rantepao tahun 2017

No	Kelurahan	T K	SD/ Ibtidaya h	SMP /tsanawiya h	SMA/SMK /alayah	PT
1	Saloso	1	1	-	-	-
2	Limbong	-	1	1	-	-
3	Mentirotik	-	1	-	-	-
4	Laang tanduk	-	1	-	-	-
5	Singki	-	2	-	-	-
6	Karassik	1	1	1	3	-
7	Rantepao	1	2	1	1	-
8	Rante pasele	1	-	1	1	-
9	Pasele	1	1	1	6	-
10	Malanggo	2	2	2	1	-
11	penanian	1	-	-	1	-
Jumlah		7	14	7	13	-

Sumber :Kota Rantepao dalam angka 2017

f. Fasilitas Olahraga

Fasilitas olah raga adalah salah satu penunjang suatu wilayah/kota sebagai tempat bermain/rekreasi bagi masyarakat, selain itu juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Di Kota Rantepao dapat beberapa fasilitas olah raga diantaranya lapangan sepak bola, bulu tangkis, lapangan tennis, lapangan takraw serta fasilitas olah raga lainnya.

g. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang ada di Kota Rantepao saat ini kondisinya sudah baik dikarenakan dalam proses perbaikan jalan, namun masih ada jalan yang kondisinya rusak yaitu jalan yang menghubungkan antar kelurahan. Jadi, di Kota Rantepao masih perlu peningkatan jalan dan jalur transportasi untuk mendukung laju kegiatan masyarakat dan juga peningkatan jumlah wisatawan.

h. Jaringan Drainase

Prinsip dasar pembuangan/ pengairan air hujan (permukaan) adalah bahwa air harus secepat mungkin dibuang dan secara terus menerus (Continue), serta dilakukan seekonomis mungkin. Dengan demikian, penyediaan saluran pembuangan merupakan

usaha untuk mengatasi masalah banjir atau genangan air pada suatu kawasan. Jaringan drainase yang ada di Kota Rantepao menggunakan saluran drainase terbuka yang mengikuti ruas jalan yang ada.

i. Jaringan Air Bersih

Prasarana dan sarana air bersih merupakan suatu kebutuhan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk dapat melayani kebutuhan penduduk akan air minum yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia.

Pelayanan air bersih saat ini masih belum optimal dalam artian belum semua jaringan jalan yang ada terdapat saluran air bersih, demikian pula belum semua rumah tangga dapat memanfaatkan air bersih yang pelayanannya dilakukan oleh PDAM.

j. Jaringan Telpon

Telepon merupakan alat pembawa pesan yang paling cepat, mudah dan murah dan terjamin keamanannya. Karakter alat komunikasi ini menjadikannya sebagai suatu kebutuhan paling dalam aktivitas masyarakat dalam kegiatannya.

Kebutuhan prasarana telepon adalah pengembangan sistem jaringan yang mengikuti ruas jalan yang dilengkapi sara pendukung rumah kabel, kotak, pemancar/tower pembagi dan telepon umum.

k. Jaringan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan primer, karena dengan listrik penduduk dapat meningkatkan produktivitasnya, misalnya dengan adanya penerangan lampu listrik penduduk dapat belajar di waktu malam hari, ronda/ siskamling malam hari termasuk perjalanan di malam hari, dengan adanya listrik penduduk dapat mengefisiensikan pekerjaan kantor dengan penggunaan komputernisasi dan peralatan lainnya yang menggunakan listrik.

UNIVERSITAS

BOSOWA

C. Pembahasan

1. Peran masyarakat dalam penataan ruang kota rantepao.

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif

- **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan penduduk yang menjadi responden secara umum relatif bervariasi, jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), SLTP, SLTA sampai pada tingkat perguruan tinggi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13 Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

Tahun 2017

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	SD	15	15,30
2.	SLTP	17	17,34
3.	SLTA	42	42,85
4.	D3	14	14,28
5.	S1	8	8,16
6.	S2	2	2,04
Jumlah		98	100

Sumber : Data Primer, 2017

Dari tabel di atas,beberapa hal yang dapat ditegaskan yaitu kebanyakan masyarakat Kota Rantepao berpendidikan SLTA,42 atau (42,85) maka dapat diartikan bahwa pemahaman terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat karna semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka kesadaran dan kesediaan untuk berperan serta akan semakin tinggi pula. Kesadaran dan kesediaan masyarakat tersebut menjadi poin penting bagi pemerintah dalam penjabaran materi - materi penataan ruang Kota Rantepao yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

- **Tingkat Pendapatan**

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi dan produktifitas, peran pekerja/buruh sangat signifikan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Rantepao, tingkat pendapatan yang menjadi responden secara umum relatif bervariasi maka untuk klasifikasi tinggi rendahnya upah pekerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ❖ Tinggi : berkisar pada nominal \geq Rp.2.000.000
- ❖ Sedang : berkisar pada nominal Rp. 1.000.000

❖ Rendah : berkisar pada nominal Rp. 500.000

Untuk hal tersebut, maka tingkat pendapatan responden yang disesuaikan dengan di atas dapat dilihat dalam tabel

4.14 berikut :

Tabel 4.14 Distribusi Responden Menurut Tingkat
Pendapatan 2017

NO	TINGKAT PENDAPATAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	500.000	7	7,14
2.	1.000.000	11	11,22
3.	1.500.000	25	25,51
4	2.000.000	32	32,65
5	≥ 2.000.000	23	23,46
Jumlah		98	100 %

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan dari tabel 4.14 di atas, maka dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan yang paling banyak adalah Rp.2.000.000 per bulan yaitu 32 atau (32,65) responden. Tingkat pendapatan masyarakat secara umum tidak menentukan kualitas dari peran serta masyarakat terhadap penataan ruang Kota Rantepao. Hal ini dikarenakan baik masyarakat yang tingkat pendapatannya

tinggi maupun yang berpendapatan rendah mempunyai motivasi yang sama untuk turut terlibat dalam proses penataan ruang terutama dalam lingkungan sekitarnya, namun bentuk peran serta yang diwujudkan tentunya berbeda sesuai dengan pola hidup masing - masing. Kepedulian terhadap perkembangan lingkungannya termasuk keinginan untuk terlibat dalam proses penataan ruang yang dilakukan.

- **Status Masyarakat**

Status masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat asli toraja dan pendatang dari berbagai daerah – daerah sekitar toraja yang menetap atau bertempat tinggal di lokasi penelitian.

Tabel 4.15 Distribusi Responden Menurut Status Masyarakat 2017

NO	STATUS MASYARAKAT	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	Suku Toraja	59	60,20
2.	Suku lain	39	39,79
Jumlah		98	100

Sumber : Data primer, 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang berdomisili di kota Rantepao yaitu suku toraja dengan frekuensi 59 atau (60,20) dimana status masyarakat sangat berpengaruh terhadap keterlibatannya dalam penataan ruang, masyarakat asli daerah tersebut biasanya lebih memperhatikan penataan ruang yang akan dilaksanakan kerna menyangkut beberapa faktor – faktor yang akan terjadi di masa yang akan datang.

- **Kedudukan Masyarakat**

Kedudukan Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai pemangku kepentingan dalam penataan ruang yang pelaksanaannya dilakukan secara kordinasi . untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut :

Tabel 4.16 Distribusi Responden Menurut Kedudukan Masyarakat 2017

NO	KEDUDUKAN MASYARAKAT	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Kepala suku	3	3,06
2	Ketua RT	9	9,18
3	Kepala Desa	5	5,10
4	Tidak ada	81	82,65

	Jumlah	98	100
--	--------	----	-----

Sumber : *Data Primer,2017*

Dari tabel 4.16 di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat di kota rantepao sebagian besar tidak memiliki kedudukan di wilayahnya ,adapun frekuensinya yaitu 81 (82,65) jadi dapat di ketahui bahwa pentingnya keterlibatan tokoh-tokoh adat juga sangat diperlukan sebagai proses pembelajaran akan kearifan lokal yang ada pada suatu daerah setempat . Selain itu, penyebaran informasi dengan ketentuan pelestarian budaya dan kawasan pusaka merupakan faktor penting lainnya dalam proses harmonisasi tersebut. Harmonisasi kearifan lokal dalam pelaksanaan penataan ruang juga dapat dilakukan dengan mempertahankan, melindungi, memelihara, dan mengembalikan fungsi kawasan pusaka budaya yang mengandung nilai sejarah, kearifan lokal, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta mendorong kehidupan dan keberagaman aktivitas sosial seni dan budaya. Penyelenggaraan penataan ruang dan kearifan lokal memiliki keterkaitan yang erat. Di tingkat daerah, kearifan lokal merupakan kunci penguatan penyelenggaraan penataan ruang.

- **Kelembagaan**

Kelembagaan yang dimaksud dalam peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao yaitu instansi – instansi yang terkait seperti Pemda dll. Dimana instansi yang terkait dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran serta dalam penataan ruang sehingga penataan ruang dapat berjalan seperti yang diharapkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.17 tentang sosialisasi pemda berikut ini :

Tabel 4.17 Distribusi Responden Menurut Kelembagaan

no	SOSIALISASI	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	pernah	31	31,63
2	sering	21	21,42
3	Tidak pernah	24	24,48
4	Tidak peduli	22	2,44
	Jumlah	98	100

Sumber : Data Primer ,2017

Tabel 4.17 tersebut di atas memperlihatkan bahwa Sosialisasi yang diterima masyarakat sangat bervariasi. Yang menyatakan pernah yaitu 31 atau (31,63) yang menandakan bahwa semakin tinggi dan berkualitas sosialisasi yang diadakan oleh PERDA atau instansi –

instansi yang terkait dan diikuti dengan penegakan tindakan hukum bagi pelanggar dapat memotivasi keterlibatan masyarakat dalam proses penataan ruang Kota Rantepao yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat lebih aktif dalam pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pemerintah dalam penataan ruang .

2. Pengaruh Signifikan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota Rantepao.

a. Uji Hipotesis Regresi Linear

Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status masyarakat, kedudukan masyarakat dan kelembagaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao.

Pengujian analisis regresi berganda dilakukan dengan program SPSS uji regresi linier berganda yang digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.18 Rekapitulasi Perhitungan Analisis Regresi Berganda

Variables Entered/Removed^b

Variables Entered	Variables Removed	Method
kelembagaan, kedudukan masyarakat, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, status masyarakat ^a		. Enter

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.506 ^a	.256	.216	20.425	.256	6.335	5	92	.000	1.140

Model Summary^b

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson	
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change		
1	.506 ^a	.256	.216	20.425	.256	6.335	5	92	.000	1.140

a. Predictors: (Constant), kelembagaan, kedudukan masyarakat,

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, status masyarakat

b. Dependent Variable: peran

masyarakat

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	13213.940	5	2642.788	6.335	.000 ^a
Residual	38381.979	92	417.195		
Total	51595.918	97			

a. Predictors: (Constant), kelembagaan, kedudukan masyarakat, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, status masyarakat

b. Dependent Variable: peran

masyarakat

Pengujian Hipotesis

Langkah-langkah uji hipotesis uji F sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status masyarakat, kedudukan masyarakat dan kelembagaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang kota rantepao.

H_1 : Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status masyarakat, kedudukan masyarakat dan kelembagaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang kota rantepao.

2. Menentukan F hitung dan signifikansi.

F hitung pada tabel di atas adalah 6,335 dan signifikansinya sebesar 0,000.

3. Menentukan F tabel

F tabel dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran)

pada

tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel -1) = 5 dan df 2 ($n - k - 1$) atau $98 - 5 - 1 = 93$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen).

Hasil yang diperoleh untuk F tabel (df1=5;df2=93) sebesar 17.194

4. Kriteria pengujian

- Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, H_0 diterima.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak.

5. Membuat kesimpulan

$F_{hitung} > F_{tabel}(df1=5;df2=93)$; ($6.335 < 17.194$) dan signifikansi $< 0,05$; ($0,001 < 0,05$), maka H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status masyarakat, kedudukan masyarakat dan kelembagaan berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	44.203	8.320		5.313	.000
tingkat pendidikan	-.370	.095	-.367	-3.918	.000
tingkat pendapatan	.074	.102	.068	.724	.471
status masyarakat	-.058	.102	-.054	-.571	.569
kedudukan masyarakat	.354	.092	.345	3.826	.000
kelembagaan	-.009	.108	-.008	-.079	.937

a. Dependent Variable: peran

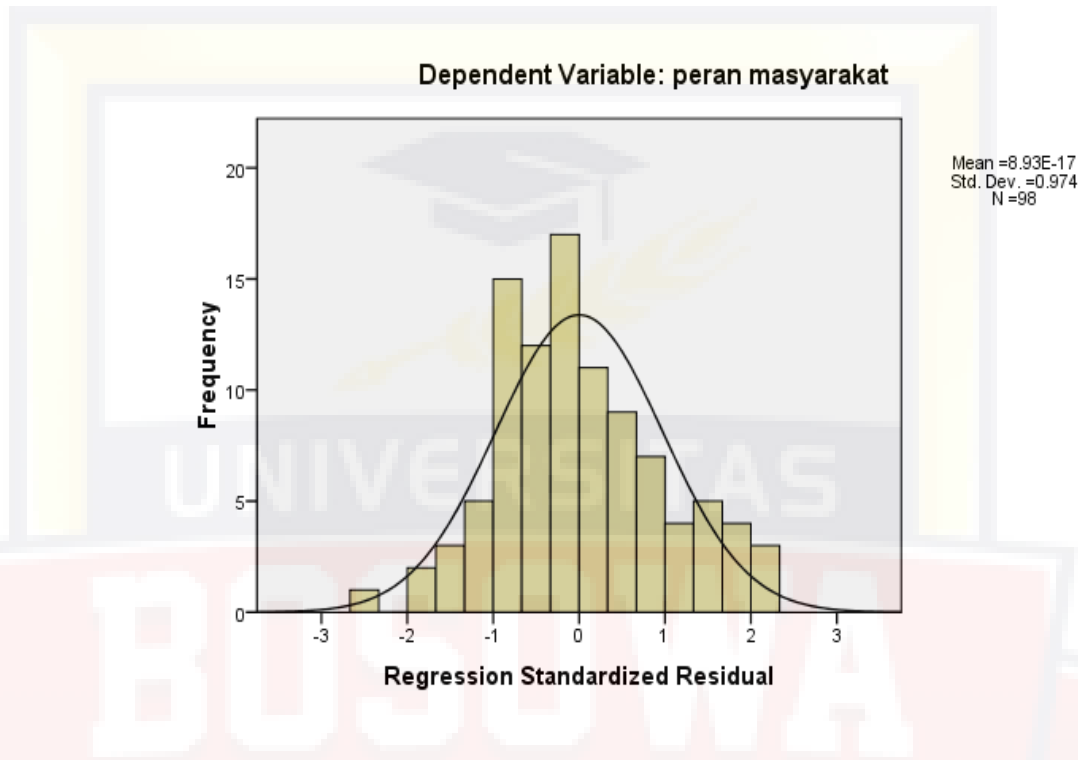
masyarakat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Data diatas menunjukkan bahwa nilai sig. untuk tingkat pendidikan adalah sebesar 0,000 ($p > 0,05$) maka dari hipotesis diterima, artinya variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao.
- Selanjutnya untuk variabel tingkat penapatan bahwa nilai sig. sebesar 0,41 ($p > 0,05$) maka dari itu hipotesis ditolak, artinya variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao.

- Selanjutnya dari variabel status masyarakat menunjukkan nilai sig. 056 ($p > 0,05$) maka dari itu hipotesis ditolak yang artinya variabel status masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao.
- Selanjutnya untuk variabel kedudukan masyarakat menunjukkan nilai sig. 0.000 ($p > 0,05$) maka dari itu hipotesis diterima, artinya variabel kedudukan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peran masyarakat.
- Dan untuk variable kelembagaan , data diatas menunjukan nilai sig. sebesar 0,93 ($p > 0,05$) maka dari itu hipotesis ditolak artinya variable kelembagaan tidak berpengaruh signifikan terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang kota Rantepao .

Histogram



Berdasarkan grafik histogram diatas, frekuensi paling tinggi pada regression standardized Residual adalah di atas 15 mean devendent variable adalah 8.93 standardized sebesar 0.97 dan N sebesar 98. Dapat disimpulkan bahwa yang paling berpengaruh signifikan dalam peran masyarakat dalam penataan ruang Kota Rantepao di atas 15 mean yang diterima yaitu 2variabel tingkat pendidikan dan kedudukan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis deskriptif kuantitatif, analisis regresi berganda dengan uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat dua (2) faktor yang signifikan pengaruhnya dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tata ruang kota yaitu; faktor Kedudukan Masyarakat (X4) dan tingkat pendidikan (X1). Hasil perhitungan Regresi Linear menyatakan adanya pengaruh signifikan.
2. Untuk Variabel Tingkat pendapatan bahwa nilai signifikan sebesar 0,41 ($p > 0,05$) , status masyarakat bernilai signifikan sebesar 0,567 ($p > 0,05$) dan variabel Kelembagaan dengan nilai signifikan sebesar 0,937 ($p > 0,05$) maka dari itu hipotesis variabel – variabel tersebut di tolak, artinya variabel tingkat pendapat, status masyarakat dan Kelembagaan tidak berpengaruh signifikan terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang Kota Rantepao.

B. Saran-saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka ada beberapa masukan atau saran dari peneliti yang ditujukan bagi pemerintah Kota Rantepao dan penelian selanjutnya dalam rangka kontribusi ilmiah sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota Rantepao, maka hal yang perlu mendapat perhatian antara lain Kelembagaan/ sosialisasi perda tentang rencana tata ruang kota harus lebih ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberi pemahaman bagi masyarakat yang nantinya dapat mengerti serta mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Kontribusi variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status masyarakat , kedudukan masyarakat dan kelembagaan terhadap peran masyarakat dalam penataan ruang hanya bagian yang berpegaruh signifikan. Perlu diteliti lebih jauh faktor lain disamping peran masyarakat.